

SISTEM PENDIDIKAN DI Indonesia

Aden Sutiapermana, S.Pd., M.Ud
Dr. Nur Aini Susanti, S.Pd., M.Pd
Muhammad Sonhaji Akbar., S.Pd., M.Kom
Giri Nurpribadi, S.T.P., M.M
Ni Komang Wiasti, S.Pd., M.Pd.H
Hasmirati, S.Ag., M.Ag., Ph.D
Muqarramah Sulaiman Kurdi, S.Pd., M.Pd.I
Mirna Rahmadina Gumati, M.Sc
Musyarrafah Sulaiman Kurdi, S.Pd., M.Pd.I
Samuel Lengkong, M.Th., M.Pd.K



Penerbit Cendikia
Mulia Mandiri

SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Penulis:

**Aden Sutiapermana, S.Pd., M.Ud
Dr. Nur Aini Susanti, S.Pd., M.Pd
Muhammad Sonhaji Akbar., S.Pd., M.Kom
Giri Nurpribadi, S.T.P., M.M
Ni Komang Wiasti, S.Pd., M.Pd.H
Hasmirati, S.Ag., M.Ag., Ph.D
Muqarramah Sulaiman Kurdi, S.Pd., M.Pd.I
Mirna Rahmadina Gumati, M.Sc
Musyarrafah Sulaiman Kurdi, S.Pd., M.Pd.I
Samuel Lengkong, M.Th., M.Pd.K**



**Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri**

SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Penulis:

Aden Sutiapermana, S.Pd., M.Ud
Dr. Nur Aini Susanti, S.Pd., M.Pd
Muhammad Sonhaji Akbar., S.Pd., M.Kom
Giri Nurpribadi, S.T.P., M.M
Ni Komang Wiasti, S.Pd., M.Pd.H
Hasmirati, S.Ag., M.Ag., Ph.D
Muqarramah Sulaiman Kurdi, S.Pd., M.Pd.I
Mirna Rahmadina Gumati, M.Sc
Musyarrafah Sulaiman Kurdi, S.Pd., M.Pd.I
Samuel Lengkong, M.Th., M.Pd.K

Editor:

Alim Perdana Kusuma

Penerbit:

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Redaksi:

Perumahan Cipta No.1
Kota Batam, 29444
Email: cendikiamuliamandiri@gmail.com

ISBN: 978-623-8744-88-6

Terbit:

IKAPI: 011/Kepri/2022
Exp. 31 Maret 2026

Ukuran:

x hal + 195 hal;
14,8cm x 21cm

Cetakan Pertama, 2025.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Sistem pendidikan di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak era kerajaan Nusantara, di mana pendidikan berpusat pada istana dan lembaga keagamaan. Selama masa penjajahan, sistem pendidikan mulai terstruktur, meskipun bersifat diskriminatif dan hanya terbuka bagi kalangan tertentu. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia membangun sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Meskipun telah banyak kemajuan, tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia masih signifikan. Disparitas kualitas pendidikan antardaerah, kekurangan tenaga pendidik yang kompeten, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah

terpencil menjadi isu yang terus diupayakan solusinya. Oleh karena itu, pengembangan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berorientasi masa depan harus menjadi prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di tingkat global.

Dalam keperluan itulah, buku **Sistem Pendidikan di Indonesia** ini sengaja penulis hadirkan untuk pembaca. Tujuan buku ini adalah sebagai panduan bagi setiap orang yang ingin mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA	1
1.1. Pendidikan di Masa Kerajaan.....	1
1.2. Pendidikan di Masa Kolonial	2
1.3. Pendidikan di Masa Kemerdekaan	4
1.4. Pendidikan di Era Orde Lama	6
1.5. Pendidikan di Era Orde Baru.....	7
1.6. Pendidikan di Era Reformasi.....	9
1.7. Pendidikan di Era Digital dan Globalisasi.....	11
BAB II STRUKTUR SISTEM PENDIDIKAN.....	13
2.1. Definisi dan Konsep Struktur Sistem Pendidikan	13
2.1.1. Definisi Struktur Sistem Pendidikan	13
2.1.2. Konsep Struktur Sistem Pendidikan.....	14
2.2. Tingkat Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Indonesia.....	15
2.3. Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.....	18
2.4. Struktur Organisasi Pendidikan.....	22
2.5. Sistem Penilaian dan Evaluasi Pendidikan.....	25
BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA.....	31
3.1. Pengertian Kurikulum.....	31
3.2. Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia	31
3.3. Struktur Kurikulum	33
3.4. Kebijakan Kurikulum Nasional.....	35

3.5.	Kurikulum 2013 dan Penerapannya.....	36
3.6.	Kurikulum Merdeka	37
3.7.	Tantangan dalam Pengembangan Kurikulum	38
3.8.	Masa Depan Kurikulum Pendidikan di Indonesia	39

BAB IV. PERAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 41

4.1.	Peran Lembaga	41
4.2.	Sejarah Lembaga.....	41
4.3.	Anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2024.	43
4.4.	Konsep Pendidikan Tinggi.....	45
4.5.	Institusi Pendidikan Tinggi.	45
4.6.	Paradigma Baru Kebijakan Pendidikan Tinggi. ..	46
4.7.	Kurikulum Pendidikan Dasar Menengah sebagai Input Pendidikan Tinggi,.....	47
4.7.1.	<i>Mindfull Learning.</i>	48
4.7.2.	<i>Meaningfull Learning.</i>	49
4.7.3.	<i>Joyfull Learning.</i>	49
4.8.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memberikan Fasilitas beasiswa.....	50
4.9.	Peran Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mencerdaskan kehidupan Bangsa.	50
4.10.	Peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memberikan Akreditasi	52
4.11.	Tujuan Akreditasi Pada Institusi Pendidikan Tinggi	53
4.12.	Kelembagaan Akreditasi.	55
4.12.1.	Lembaga Akreditasi Mandiri.....	55
4.12.2.	Lembaga Akreditasi Mandiri Pemerintah..	55

4.12.3.	Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat. ...	56
4.13.	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi [BAN-PT]	58
4.14.	Akreditasi Internasional.....	60
4.14.1.	Otonomi Perguruan Tinggi.	61
4.15.	Peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Kabinet Merah Putih.	62
4.16.	Posisi Kebudayaan pada Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	63
BAB V PENDANAAN PENDIDIKAN.....		67
5.1.	Pendanaan Pendidikan	67
5.2.	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.....	75
5.3.	Alokasi Pendanaan Pendidikan.....	79
BAB VI KUALITAS PENDIDIKAN		93
6.1.	Pengantar Kualitas Pendidikan.....	93
6.2.	Komponen Kualitas Pendidikan.....	95
6.3.	Indikator Kualitas Pendidikan	100
6.4.	Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan	102
BAB VII MASALAH DAN TANTANGAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN.....		109
7.1.	Pendahuluan.....	109
7.2.	Ketimpangan Akses Pendidikan	110
7.3.	Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik.....	112
7.4.	Kurikulum yang Berubah-Ubah	113
7.5.	Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan.....	114
7.6.	Tantangan Literasi dan Numerasi.....	116
7.7.	Masalah Pendanaan Pendidikan	117

- 7.8. Tantangan Globalisasi dan Pendidikan 4.0 118
- 7.9. Rekomendasi dan Solusi 119

BAB VIII INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN
..... 121

- 8.1. Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Teknologi Pendidikan..... 123
 - 8.1.1. Merangkul Kecerdasan Buatan: Guru 126
 - 8.1.2. Merangkul Kecerdasan Buatan : Siswa 127
- 8.2. Perusahaan Teknologi sebagai Aktor Baru dalam Pendidikan..... 129
- 8.3. Tantangan Inovasi dan Teknologi Pendidikan di Era Digital 132

BAB IX PENDIDIKAN KARAKTER..... 139

- 9.1. Apa itu Pendidikan Karakter?..... 139
- 9.2. Landasan Filosofis dan Teoritis Pendidikan Karakter 140
- 9.3. Kebijakan Pendidikan Karakter di Indonesia ... 142
- 9.4. Dimensi Pendidikan Karakter..... 144
- 9.5. Metode dan Strategi Pengajaran Pendidikan Karakter 150
- 9.6. Penguatan Pendidikan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka..... 151

BAB X PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN..... 155

- 10.1. Pengertian Peran Masyarakat..... 155
- 10.2. Relasi Masyarakat dan Pendidikan..... 156
- 10.3. Landasan Peran Masyarakat dalam Pendidikan 159
- 10.4. Implikasi Peran Masyarakat Dalam Pendidikan 162
- 10.5. Peran Masyarakat Sebagai Komite Sekolah..... 165

DAFTAR PUSTAKA.....167

BAB I

SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

1.1. Pendidikan di Masa Kerajaan

Pada masa kerajaan di Indonesia, pendidikan berfungsi sebagai sarana membangun moral, spiritual, dan keterampilan sesuai nilai-nilai yang dianut masyarakat. Pendidikan ini dipengaruhi oleh perkembangan agama dan budaya, khususnya Hindu-Buddha dan Islam.

Pada era Hindu-Buddha, pendidikan bersifat elitis dan berpusat pada istana, candi, atau vihara. Hanya kaum bangsawan dan pemuka agama yang memperoleh akses pendidikan. Materi yang diajarkan meliputi ajaran agama, filsafat, seni sastra, astronomi, dan pengobatan tradisional. Guru berasal dari kalangan brahmana atau biksu yang memanfaatkan kitab seperti Weda dan Tripitaka sebagai bahan ajar. Kerajaan Sriwijaya menjadi contoh penting karena dikenal sebagai pusat pembelajaran Buddha terbesar di Asia Tenggara.

Masuknya Islam membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan. Pesantren menjadi institusi pendidikan utama, yang menyediakan pembelajaran

berbasis agama kepada masyarakat luas. Materi yang diajarkan mencakup Al-Qur'an, fikih, tasawuf, serta ilmu pengetahuan umum seperti matematika dan bahasa Arab. Metode pembelajaran halaqah memungkinkan hubungan langsung antara kiai dan santri. Kesultanan Aceh dan Demak merupakan pusat penyebaran pendidikan Islam yang meluas hingga ke wilayah pedalaman.

Pendidikan pada masa kerajaan turut membentuk identitas budaya dan moral bangsa. Sistem ini melahirkan tradisi literasi, terutama di kalangan bangsawan, dan mendorong pengembangan seni sastra seperti Kakawin Ramayana dan Nagarakretagama. Meskipun terbatas pada golongan tertentu, pendidikan ini meletakkan dasar penting bagi perkembangan pendidikan di masa-masa berikutnya.

1.2. Pendidikan di Masa Kolonial

Pendidikan di masa kolonial di Indonesia mencerminkan struktur sosial yang diskriminatif. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan difokuskan untuk melayani kepentingan kolonial, dengan akses terbatas bagi masyarakat pribumi. Sistem ini membedakan pendidikan untuk orang Eropa, kaum bangsawan pribumi, dan rakyat biasa.

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah seperti *Europeesche Lagere School (ELS)* untuk anak-anak Eropa dan elite pribumi. Sementara itu, masyarakat pribumi umumnya hanya mendapatkan pendidikan dasar di *Inlandsche School*, dengan kurikulum terbatas pada membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan tinggi hampir tidak terjangkau oleh pribumi hingga muncul kebijakan **Politik Etis** pada awal abad ke-20, yang membuka kesempatan lebih luas melalui pendirian sekolah seperti *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)* dan *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)*.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), pendidikan mengalami perubahan. Jepang menutup sekolah Belanda dan memperkenalkan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia mulai digunakan secara resmi dalam sistem pendidikan. Namun, fokus pendidikan lebih diarahkan pada propaganda Jepang dan pelatihan keterampilan kerja untuk mendukung kepentingan militer.

Dampak pendidikan kolonial mencakup terciptanya kesenjangan sosial yang tajam, tetapi juga melahirkan kelompok intelektual pribumi yang menjadi pelopor gerakan kebangsaan. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara memanfaatkan pengalaman

pendidikan kolonial untuk membangun sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif setelah kemerdekaan.

1.3. Pendidikan di Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam membangun bangsa yang baru. Pemerintah menyadari pentingnya pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran nasional, membangun karakter bangsa, dan memberantas buta huruf yang tinggi.

1. Periode Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Pada masa ini, sistem pendidikan warisan kolonial masih digunakan karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Namun, beberapa langkah penting dilakukan:

- Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar: Semua jenjang pendidikan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk memupuk identitas nasional.
- Pembentukan Kurikulum Nasional: Kurikulum dirancang untuk mendukung pembangunan karakter bangsa dengan

menanamkan nilai-nilai patriotisme.

Pendidikan pada periode ini juga diwarnai oleh keterbatasan fasilitas, jumlah guru, dan buku pelajaran akibat dampak perang.

2. Periode Orde Lama (1950-1965)

Pemerintah Orde Lama menitikberatkan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional:

- **Wajib Belajar 6 Tahun:** Program ini mulai diperkenalkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar.
- **Pendidikan untuk Semua Kalangan:** Pendidikan digalakkan untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Namun, kondisi ekonomi yang sulit membuat kualitas pendidikan belum optimal.

3. Perkembangan Penting

- **Pendirian Universitas:** Beberapa universitas negeri didirikan, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.
- **Penguatan Pendidikan Guru:** Institusi pendidikan guru seperti IKIP didirikan

untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.

Pendidikan di masa ini menjadi awal dari sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif, walau masih menghadapi banyak tantangan, seperti kesenjangan akses dan kualitas antara kota dan desa.

1.4. Pendidikan di Era Orde Lama

Era Orde Lama (1945-1966) adalah periode awal pemerintahan Presiden Soekarno setelah kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pembangunan negara. Sistem pendidikan di masa ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan identitas nasional dan memiliki semangat perjuangan. Meskipun terdapat berbagai tantangan, era ini mencatatkan langkah-langkah signifikan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia.

Salah satu kebijakan utama pada masa ini adalah Wajib Belajar 6 Tahun yang mulai diperkenalkan pada tahun 1950. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang masih memiliki tingkat buta huruf tinggi. Namun, pelaksanaannya

masih terkendala oleh kurangnya fasilitas dan guru di daerah terpencil.

Selain itu, di masa Orde Lama, pemerintahan juga berusaha membangun sistem pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila. Kurikulum pendidikan disesuaikan dengan tujuan tersebut, dan pendidikan karakter menjadi bagian dari pembelajaran. Pemerintah juga berfokus pada pendidikan guru dengan mendirikan institusi pendidikan guru seperti IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) yang bertujuan untuk mencetak tenaga pendidik yang berkualitas.

Pendidikan di masa Orde Lama menghadapi banyak tantangan, antara lain kekurangan sarana dan prasarana pendidikan serta ketimpangan antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, masa ini menjadi tonggak awal pendidikan nasional yang lebih inklusif dan berfokus pada penyebaran pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat.

1.5. Pendidikan di Era Orde Baru

Era Orde Baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia. Pada masa ini, pendidikan menjadi prioritas utama

dalam pembangunan nasional, dengan fokus pada pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan ekonomi negara.

Salah satu kebijakan besar pada era ini adalah Program Wajib Belajar 9 Tahun yang diperkenalkan pada tahun 1984. Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat miskin. Dengan adanya program ini, pendidikan dasar mulai diterima oleh hampir semua anak Indonesia, meskipun kualitasnya masih bervariasi antara kota dan desa.

Kurikulum pendidikan di masa Orde Baru juga mengalami penyesuaian dengan memperkenalkan pendidikan Pancasila sebagai dasar dalam setiap mata pelajaran, yang bertujuan untuk memperkuat nasionalisme dan memperkenalkan ideologi negara kepada siswa. Selain itu, terdapat penekanan pada pendidikan karakter untuk membentuk generasi yang disiplin, bekerja keras, dan loyal kepada negara.

Pendidikan tinggi juga mengalami perkembangan pesat. Banyak universitas negeri dan swasta dibangun di berbagai wilayah Indonesia untuk menciptakan lulusan yang siap bekerja di sektor industri yang berkembang pesat pada masa itu. Namun, sistem

pendidikan ini lebih menekankan pada teori daripada keterampilan praktis, dan kurang memberi ruang untuk pengembangan kreativitas atau pemikiran kritis.

Meski begitu, Orde Baru juga menghadapi kritik terkait dengan sentralisasi sistem pendidikan yang membatasi kebebasan akademik dan kurangnya perhatian terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia.

1.6. Pendidikan di Era Reformasi

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk di bidang pendidikan. Setelah jatuhnya Orde Baru, sistem pendidikan Indonesia mengalami transformasi untuk menanggapi tuntutan demokratisasi, kebebasan akademik, serta perbaikan kualitas pendidikan. Salah satu perubahan utama adalah desentralisasi pendidikan, yang memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur pendidikan.

Pada periode ini, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 disahkan, yang menjadi landasan hukum penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. UUSPN ini menekankan pada pemerataan akses pendidikan,

peningkatan kualitas pendidikan, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan melalui kurikulum yang berbasis pada kompetensi. Program Wajib Belajar 12 Tahun pun mulai diperkenalkan untuk mencakup pendidikan dasar dan menengah, sebagai upaya untuk mengurangi angka putus sekolah.

Sistem pendidikan pada era Reformasi juga menekankan pada pendidikan berbasis kompetensi, yang bertujuan agar lulusan pendidikan siap memasuki dunia kerja. Perubahan kurikulum dengan penekanan pada keterampilan praktis dan pembelajaran berbasis teknologi menjadi tren utama. Sekolah mulai memperkenalkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses belajar mengajar untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan globalisasi.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam kebijakan pendidikan, era Reformasi juga dihadapkan pada tantangan besar, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah dan akses yang terbatas untuk kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan.

1.7. Pendidikan di Era Digital dan Globalisasi

Era digital dan globalisasi membawa dampak besar terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara orang belajar, mengakses informasi, dan berinteraksi. Pendidikan di era ini menghadapi tantangan besar sekaligus peluang untuk berkembang lebih maju.

Salah satu ciri utama pendidikan di era digital adalah pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Penggunaan perangkat komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran digital telah memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Platform daring (online) seperti Learning Management Systems (LMS), MOOC (Massive Open Online Courses), serta aplikasi pembelajaran seperti edX dan Khan Academy memberi kesempatan bagi pelajar dari berbagai latar belakang untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa batasan geografis. Sistem pendidikan di era ini pun semakin mengarah pada pembelajaran berbasis teknologi dan kolaboratif, di mana siswa dapat belajar secara mandiri atau bekerja dalam kelompok dengan memanfaatkan teknologi.

Globalisasi juga mempengaruhi kurikulum pendidikan yang lebih mengarah pada standar

internasional, dengan meningkatkan kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, serta pemahaman tentang budaya global. Di sisi lain, globalisasi membawa tantangan terkait kompetisi global yang semakin ketat, mendorong negara-negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar global.

Namun, era digital juga menimbulkan masalah, seperti kesenjangan akses teknologi di berbagai wilayah, kecanduan gadget, dan pengaruh negatif media sosial terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pendidikan di era digital dan globalisasi memerlukan kebijakan yang bijak agar dapat mengoptimalkan potensi teknologi sekaligus menjaga kualitas pendidikan secara merata.

BAB II

STRUKTUR SISTEM PENDIDIKAN

2.1. Definisi dan Konsep Struktur Sistem Pendidikan

Struktur sistem pendidikan merujuk pada susunan atau organisasi yang mengatur pelaksanaan pendidikan di suatu negara atau wilayah. Struktur ini mencakup berbagai tingkat, lembaga, kebijakan, serta hubungan antara berbagai elemen yang terlibat dalam pendidikan. Dalam konteks Indonesia, struktur sistem pendidikan disusun untuk memberikan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas kepada seluruh warga negara, dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003.

2.1.1. Definisi Struktur Sistem Pendidikan

Secara umum, struktur sistem pendidikan adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berhubungan. Komponen utama dalam sistem pendidikan meliputi:

- 1) Tingkat Pendidikan: Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.
- 2) Jenis Pendidikan: Pendidikan formal, nonformal, dan informal, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) Lembaga Pendidikan: Termasuk sekolah, perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang mendukung pendidikan masyarakat.
- 4) Kurikulum dan Materi Pembelajaran: Standar kurikulum yang harus diikuti oleh semua lembaga pendidikan dalam proses belajar mengajar.
- 5) Sumber Daya Pendidikan: Meliputi guru, fasilitas pendidikan, dana, dan teknologi yang digunakan dalam proses pendidikan.

2.1.2. Konsep Struktur Sistem Pendidikan

Konsep dasar dari struktur sistem pendidikan adalah berkelanjutan dan terintegrasi, yang berarti pendidikan harus berjalan secara bertahap mulai dari tingkat dasar hingga tinggi

dengan hubungan yang jelas antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya. Di samping itu, sistem pendidikan harus inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, serta merespons perkembangan zaman, seperti integrasi teknologi dalam pembelajaran.

Dalam struktur sistem pendidikan yang baik, juga terdapat hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di seluruh wilayah. Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan regulasi pendidikan, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

2.2. Tingkat Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkat atau jenjang pendidikan yang saling berhubungan dan membentuk suatu rangkaian yang berkelanjutan. Masing-masing jenjang pendidikan ini memiliki tujuan dan kurikulum yang berbeda,

disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003, sistem pendidikan Indonesia terdiri dari beberapa tingkat berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan pertama yang ditujukan untuk anak-anak usia 0-6 tahun. Tujuan utama dari PAUD adalah untuk memberikan stimulasi kepada anak dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Pendidikan ini meliputi pendidikan informal yang dilakukan di rumah oleh orang tua dan pendidikan formal yang dapat berupa taman kanak-kanak (TK) atau kelompok bermain. Meskipun tidak wajib, PAUD merupakan dasar yang sangat penting untuk perkembangan anak sebelum memasuki pendidikan formal.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mencakup pendidikan usia 6-15 tahun. Berdasarkan kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun,

pendidikan dasar menjadi wajib bagi seluruh anak Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar, keterampilan, dan nilai-nilai karakter yang menjadi fondasi bagi pendidikan selanjutnya. Kurikulumnya mencakup mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan sosial.

3. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMA lebih fokus pada persiapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan SMK lebih menekankan pada keterampilan teknis untuk dunia kerja. Pendidikan menengah adalah kelanjutan dari pendidikan dasar dan menjadi jenjang yang mempersiapkan siswa untuk memasuki kehidupan sosial dan dunia kerja.

4. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), termasuk universitas, institut, akademi, dan politeknik. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma, Sarjana

(S1), Magister (S2), dan Doktor (S3). Pendidikan tinggi bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli, profesional, dan ilmuwan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional serta kompetisi global.

5. Pendidikan Nonformal dan Informal

Selain pendidikan formal yang terdiri dari PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, ada juga pendidikan nonformal yang meliputi kursus, pelatihan, dan lembaga pendidikan masyarakat. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat, yang mendukung pendidikan formal dan nonformal.

2.3. Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal

Sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pendidikan nonformal dan informal, yang ketiganya memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik.

Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing jenis pendidikan:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan yang terstruktur dan diakui oleh pemerintah, dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Jenjang pendidikan formal meliputi:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Pendidikan untuk anak usia 0-6 tahun yang bertujuan untuk memberikan stimulasi dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional.
- Pendidikan Dasar: Termasuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang wajib diikuti oleh setiap anak Indonesia berdasarkan kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun.
- Pendidikan Menengah: Terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja atau perguruan tinggi.
- Pendidikan Tinggi: Pendidikan yang berlangsung di universitas atau institut,

dengan jenjang Diploma, Sarjana (S1),
Magister (S2), dan Doktor (S3).

Pendidikan formal memiliki standar tertentu dalam hal kurikulum, pengajaran, dan evaluasi, serta diatur oleh lembaga pendidikan yang diakui secara resmi.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal dan lebih fleksibel dalam hal kurikulum dan waktu pelaksanaan. Jenis pendidikan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, atau untuk pengembangan keterampilan khusus. Contoh dari pendidikan nonformal adalah:

- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Kursus dan pelatihan keterampilan
- Lembaga pelatihan vokasional Pendidikan nonformal sering kali lebih menekankan pada keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari,

tanpa struktur formal yang jelas, namun tetap memiliki nilai edukasi. Sumber pendidikan ini berasal dari pengalaman hidup dan interaksi dengan keluarga, teman, atau masyarakat.

Contohnya adalah:

- Pendidikan yang diberikan oleh orang tua di rumah.
- Pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja atau lingkungan sosial.
- Pembelajaran dari media, buku, atau kegiatan lainnya yang bersifat non-formal.

Pendidikan informal bersifat lebih fleksibel, tidak terikat pada kurikulum tertentu, dan lebih kepada pembentukan karakter serta nilai-nilai kehidupan.

Perbedaan Utama:

- Pendidikan Formal: Terstruktur, resmi, mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan.
- Pendidikan Nonformal: Fleksibel, dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus, tanpa mengikuti kurikulum formal.
- Pendidikan Informal: Tidak terstruktur, lebih bersifat pengalaman sehari-hari, dan berbasis pada interaksi sosial.

Ketiga jenis pendidikan ini saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing.

2.4. Struktur Organisasi Pendidikan

Struktur organisasi pendidikan merujuk pada susunan atau tatanan yang mengatur bagaimana sistem pendidikan dikelola, dijalankan, dan diawasi. Struktur ini mencakup berbagai lembaga, badan pengelola pendidikan, serta hubungan antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia, struktur organisasi pendidikan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yang mulai dari pengelolaan pendidikan di tingkat pusat hingga di tingkat daerah atau lokal.

1. Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Pemerintah pusat, yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), memegang peran utama dalam merancang kebijakan pendidikan nasional, menetapkan standar, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan secara umum. Kementerian ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, mengembangkan kurikulum, menetapkan anggaran pendidikan,

dan melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional.

2. Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan)

Pemerintah daerah berperan dalam implementasi kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tugas ini dijalankan oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan pendidikan di daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendidikan di wilayah tersebut. Dinas ini juga berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik di daerah.

3. Lembaga Pendidikan Formal

Lembaga pendidikan formal mencakup sekolah (untuk pendidikan dasar dan menengah) serta perguruan tinggi (untuk pendidikan tinggi). Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab langsung dalam proses pembelajaran, pengajaran, dan pengembangan peserta didik sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Di sekolah, struktur organisasi melibatkan kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan

pihak-pihak lainnya yang berperan dalam mendukung kegiatan pendidikan.

4. Lembaga Pendidikan Nonformal

Selain lembaga pendidikan formal, terdapat juga lembaga pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, dan pelatihan keterampilan. Lembaga ini berfungsi memberikan pendidikan yang lebih fleksibel, terjangkau, dan dapat diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal.

5. Organisasi Profesi dan Pengawasan

Terdapat pula organisasi profesi yang mendukung pengembangan kualitas pendidikan, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi. Selain itu, lembaga seperti Badan Akreditasi Nasional (BAN) di tingkat pendidikan tinggi berfungsi untuk melakukan akreditasi dan evaluasi terhadap kualitas pendidikan.

6. Peran Masyarakat dan Orang Tua

Masyarakat dan orang tua juga memegang peranan penting dalam pendidikan, meskipun mereka bukan bagian dari struktur organisasi formal. Mereka berperan dalam mendukung

kegiatan pendidikan, memberikan dukungan moral dan finansial, serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendidikan di lingkungan sekitar.

Struktur Organisasi dalam Pendidikan Indonesia:

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
- Dinas Pendidikan (di tingkat provinsi dan kabupaten/kota)
- Lembaga Pendidikan Formal (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
- Lembaga Pendidikan Nonformal
- Organisasi Profesi
- Masyarakat dan Orang Tua

2.5. Sistem Penilaian dan Evaluasi Pendidikan

Sistem penilaian dan evaluasi pendidikan merujuk pada serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik serta kualitas proses dan hasil pendidikan. Penilaian dan evaluasi ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh guru, sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pembelajaran dan

kebijakan pendidikan.

1. Penilaian Pendidikan

Penilaian dalam pendidikan adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian ini dapat bersifat formatif atau sumatif:

- Penilaian Formatif: Dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung, bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Misalnya, ujian harian, tugas rumah, dan kuis.
- Penilaian Sumatif: Dilakukan pada akhir periode pembelajaran, biasanya untuk menilai pencapaian keseluruhan peserta didik setelah mengikuti satu unit pelajaran atau satu semester. Contohnya adalah ujian akhir semester (UAS) atau ujian nasional (UN).

Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen, seperti tes tertulis, tugas proyek, presentasi, portofolio, serta observasi. Penilaian ini dapat mengukur berbagai aspek,

termasuk pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif).

2. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi pendidikan adalah proses yang lebih luas yang mencakup penilaian terhadap seluruh aspek pendidikan, termasuk kurikulum, proses pembelajaran, dan hasil belajar. Evaluasi bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan kualitas pendidikan yang diberikan, serta untuk menentukan apakah tujuan pendidikan telah tercapai.

Ada dua jenis evaluasi pendidikan:

- Evaluasi Internal: Dilakukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri, misalnya oleh guru, sekolah, atau perguruan tinggi, untuk menilai kualitas pembelajaran dan hasilnya. Evaluasi ini digunakan untuk perbaikan dan pengembangan internal.
- Evaluasi Eksternal: Dilakukan oleh lembaga luar yang memiliki otoritas, seperti Badan Akreditasi Nasional (BAN) atau lembaga pemerintah, untuk menilai sejauh mana lembaga pendidikan memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan.

3. Standar Penilaian dan Evaluasi Pendidikan

Penilaian dan evaluasi pendidikan di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup berbagai elemen, antara lain:

- Standar Isi: Menentukan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik.
- Standar Proses: Menentukan cara-cara pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa.
- Standar Penilaian: Menentukan cara dan kriteria penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi.

Pemerintah Indonesia juga mengembangkan sistem ujian yang melibatkan Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu cara evaluasi hasil belajar di tingkat sekolah dasar dan menengah, serta ujian seleksi di perguruan tinggi seperti SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

4. Peran Penilaian dan Evaluasi dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penilaian dan evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur prestasi peserta didik, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi, guru dan lembaga pendidikan dapat merancang strategi perbaikan, baik di tingkat individu, kelompok, maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. Penilaian yang dilakukan secara objektif dan sistematis dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pendidikan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan.

BAB III

KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA

3.1. Pengertian Kurikulum

Kurikulum adalah suatu rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, dan kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan. Menurut Mulyasa (2013), kurikulum berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengarahkan proses pembelajaran dan mengidentifikasi apa yang harus dipelajari oleh siswa. Kurikulum tidak hanya mencakup konten akademik, tetapi juga nilai-nilai moral, keterampilan sosial, dan kepribadian yang ingin dibentuk dalam diri peserta didik. Dalam konteks Indonesia, kurikulum berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan individu yang berkualitas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global.

3.2. Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Sejarah kurikulum di Indonesia mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan budaya yang telah berlangsung sejak masa penjajahan hingga saat ini.

Beberapa fase penting dalam sejarah kurikulum meliputi:

1. Masa Kolonial (1600-an hingga 1945):

Pendidikan pada masa ini sangat terpusat pada penguasaan bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan dasar yang mendukung administrasi kolonial (Supriyadi, 2019).

Kurikulum yang diterapkan lebih bersifat eksklusif, hanya untuk kalangan tertentu, sehingga mengabaikan sebagian besar populasi pribumi.

2. Pasca Kemerdekaan (1945-1965):

Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya untuk membangun sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan. Kurikulum pertama yang dikeluarkan adalah kurikulum 1947, yang mengedepankan pendidikan kewarganegaraan (Nurdin, 2015).

3. Orde Baru (1966-1998)

Di bawah pemerintahan Orde Baru, terjadi penyeragaman kurikulum dengan penekanan pada pendidikan moral dan ideologi negara. Kurikulum 1975 menekankan pengajaran sains dan teknologi, sementara kurikulum 1984

memperkenalkan sistem kredit semester (Yusuf, 2014).

4. Era Reformasi (1998-sekarang)

Reformasi membawa perubahan besar dalam kurikulum dengan menekankan pada otonomi daerah dan keberagaman. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diperkenalkan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengajaran dan penilaian (Rachmadtullah & Ahmad, 2018).

3.3. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum di Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait:

1. Tujuan Pendidikan

Tujuan kurikulum mencakup pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017). Tujuan ini dirumuskan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang baik.

2. Materi Ajar

Materi ajar meliputi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, yang mencakup pendidikan umum, pendidikan karakter, serta

muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan dapat bervariasi, mulai dari metode konvensional seperti ceramah dan diskusi, hingga metode modern yang mengintegrasikan teknologi, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran daring (Winarno, 2016).

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur pencapaian belajar siswa, mencakup berbagai bentuk penilaian, termasuk ujian, tugas, dan proyek. Penilaian autentik menjadi penting dalam kurikulum modern untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang kemampuan siswa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017).

Kurikulum juga dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kurikulum lokal yang disesuaikan dengan kondisi daerah, dan kurikulum berbasis kompetensi yang berfokus pada keterampilan praktis.

3.4. Kebijakan Kurikulum Nasional

Kebijakan kurikulum nasional dirumuskan untuk memastikan kualitas dan keseragaman pendidikan di seluruh Indonesia. Beberapa aspek penting dari kebijakan ini meliputi :

1. Penyusunan Kurikulum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai otoritas pendidikan nasional menyusun kurikulum dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, akademisi, dan perwakilan masyarakat (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2013).

2. Standar Nasional Pendidikan

Standar ini bertujuan untuk memastikan mutu pendidikan yang konsisten di seluruh daerah, mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017).

3. Peningkatan Kualitas Guru

Salah fokus utama kebijakan adalah peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan profesional berkelanjutan (Yusuf, 2014). Guru

diharapkan dapat mengimplementasikan kurikulum secara efektif.

3.5. Kurikulum 2013 dan Penerapannya

Kurikulum 2013 (K13) diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif. Beberapa karakteristik utama K13 meliputi:

1. Pendekatan Saintifik

K13 mengedepankan metode pembelajaran yang berbasis pada observasi, eksperimen, diskusi, dan penalaran. Siswa didorong untuk aktif terlibat dalam proses belajar (Mulyasa, 2013).

2. Pengembangan Karakter

Selain pengetahuan akademik, K13 menekankan pengembangan karakter melalui pendidikan moral, etika, dan nilai-nilai sosial (Nuridin, 2015).

3. Penilaian Otentik

K13 menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur kompetensi siswa, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh

tentang kemajuan siswa (Rachmadtullah & Ahmad, 2018).

Penerapan K13 di lapangan menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman guru tentang kurikulum, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari beberapa pihak. Untuk mengatasi ini, evaluasi berkala dan pelatihan bagi guru menjadi sangat penting.

3.6. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai upaya memberikan kebebasan lebih bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Beberapa poin penting dari Kurikulum Merdeka adalah:

1. Pembelajaran Berbasis Proyek

Siswa didorong untuk terlibat dalam proyek yang relevan dengan konteks kehidupan mereka. Ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi (Syafrudin, 2020).

2. Pendidikan yang Relevan

Materi ajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga siswa merasa lebih

terlibat dan termotivasi dalam belajar.

3. Kemandirian Siswa

Kurikulum ini mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam proses belajar mereka sendiri, memfasilitasi penemuan dan eksplorasi.

Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21.

3.7. Tantangan dalam Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pendidikan dapat berkembang secara optimal:

1. Kesenjangan Kualitas Pendidikan

Terdapat disparitas yang signifikan dalam kualitas pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan. Akses terhadap fasilitas pendidikan, sumber daya, dan pelatihan guru sering kali tidak merata (Supriyadi, 2019).

2. Keterbatasan Sumber Daya

Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, kekurangan fasilitas dan sumber daya yang memadai, termasuk buku, teknologi, dan akses

internet (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2013).

3. Relevansi dengan Dunia Kerja

Kurikulum sering kali dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan industri, mengakibatkan lulusan kesulitan dalam memasuki pasar kerja (Rachmadtullah & Ahmad, 2018). Kolaborasi dengan sektor industri perlu ditingkatkan.

4. Perubahan Cepat Teknologi

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kurikulum harus terus diperbarui untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan digital di masa depan (Yusuf, 2014).

3.8. Masa Depan Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Masa depan kurikulum pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang inovatif dan responsif terhadap perubahan. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil meliputi:

1. Penelitian dan Pengembangan

Melakukan riset yang mendalam untuk memahami kebutuhan pendidikan yang terus berubah, termasuk penyesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan

globalisasi.

2. Keterlibatan Stakeholder

Membangun kemitraan antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan efektif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017).

3. Fleksibilitas dan Otonomi

Memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka.

Kurikulum yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global. Komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat, sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas.

BAB IV.

PERAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

4.1. Peran Lembaga

Peran diinterpretasikan sebagai suatu kemanfaatan yang dilakukan oleh suatu Lembaga, dalam hal ini adalah Lembaga Kementerian. Kementerian yang berperan mencerdaskan kehidupan bangsa, berkaitan dengan membangun nuansa kualitas sumberdaya manusia berbagai tingkatan memerlukan suatu Nomenklatur tersebut sesuai dengan kurun waktunya mengalami perubahan, yang menyesuaikan kebutuhan suatu Kabinet dengan kebutuhan khusus, dan hal tersebut merupakan keputusan dari pemimpin Eksekutif tertinggi yang terdapat di Republik Indonesia.

4.2. Sejarah Lembaga.

Terbentuknya Lembaga Kementerian tersebut, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada awalnya berperan memberikan semangat KeIndonesiaan. Berbagai dinamika telah dijalani dengan berbagai perubahan Nomenklatur, Pada tahun 1951 Kabinet Sukiman menggunakan terminologi

Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Pemerintahan Presiden Indonesia ke-2, yaitu selama 32 tahun Nama Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. pada tahun 2011 terminologi Departemen pada Lembaga Formal Departemen yang melapor langsung ke Presiden diganti menjadi Kementerian, dan Lembaga tersebut kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada Tahun 2019 terjadi penggabungan, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada Tahun 2024 terjadi perubahan Nomenklatur dari Kemendikbudristek, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diubah menjadi tiga Kementerian dengan argumentasi agar lebih fokus, yaitu :

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Fokus dari Pendidikan Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Fokus pada *University* dan yang setara
3. Kementerian Kebudayaan. Fokus pada *Heritage*, Kebudayaan tak Benda dan

keterkaitan dengan UNESCO lainnya.

4.3. Anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2024.

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Negara yang melibatkan APBN,yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,sesuai dengan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp.17,48 triliun menjadi Rp.97,7 triliun.Suatu Anggaran Naik bertujuan untuk menyediakan Program Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2024. Program Prioritas Nasional sesuai dengan RKP 2024 tersebut adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan pemajuan Kebudayaan, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, serta peningkatan Budaya Literasi,Inovasi, dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan.

Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp.15,29 triliun yang digunakan untuk rehabilitasi, penambahan fasilitas Infrastruktur dan Penyediaan Sarana Pendidikan untuk PAUD, SD, SMP .SMA. SMK, SLB dan SKB, serta Pembangunan SMA dan SLB. Selain Dana Alokasi Khusus Fisik, Kemendikbudristek juga melakukan

perencanaan DAK Non Fisik Bidang Pendidikan sebesar 116,31 triliun untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya serta izin Aparatur Sipil Negara Daerah. Pada Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dampak pada penguatan program program prioritas dalam memastikan layanan pendidikan, pemajuan kebudayaan, penelitian dan teknologi lebih berkualitas.

Lima arah kebijakan Kemendikbudristek tahun 2024 adalah :

1. Peningkatan PAUD dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun melalui program Indonesia Pintar.
2. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah bagi anak anak dari daerah tertinggal.
3. Penguatan pendidikan kesetaraan.
4. Pendidikan inklusif. Pendidikan khusus dan layanan khusus
5. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pagu Anggaran untuk Tahun 2024 untuk arah kebijakan ini adalah sebesar Rp.13,99 triliun. Kebijakan kedua adalah Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan

Pengajaran dengan pagu anggaran sebesar Rp.15,82 triliun.

4.4. Konsep Pendidikan Tinggi.

Konsep Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Sains, atau dengan terminologi Bahasa Inggris adalah *Science* secara psikologis berkaitan dengan keilmuan bersifat ilmiah dengan nuansa pemahaman umum, sedangkan Teknologi adalah Penerapan Praktis suatu Ilmu adalah pada *brain mechanic*, yaitu berkaitan dengan kemampuan merancang unsur kebaruan pada teknologi baru terbaru, demikian makna Penelitian sebagai identitas keprofesionalan, serta ketokohan para Dosen untuk mendarmabaktikan pada Negara pada tahun 2024 masih bersifat *hidden* pada nomenklatur, mengingat kewajiban Dosen adalah melakukan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

4.5. Institusi Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan substansi habitat pada Institusi Pendidikan Tinggi, maka keterkaitan dengan mekanisme bersifat interaktif adalah pada Dosen sebagai Tenaga Pendidik. Pegawai Administrasi sebagai

Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa sesuai jenjang Pendidikan Tinggi dari D1,D2,D3,D4,S1,S2 dan S3.Institusi Pendidikan Tinggi pada tingkat akademi komunitas,akademi,politeknik,sekolah tinggi,institut dan universitas.Tenaga Pendidik mempunyai jenjang Jabatan Fungsional,yaitu dimulai dari Asisten ahli,Lektor200,Lektor300,Lektor Kepala400,Lektor Kepala550,Lektor Kepala 700,Professor850 ,Guru Besar1050.

4.6. Paradigma Baru Kebijakan Pendidikan Tinggi.

Sesuai dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berisi : Persiapan mengenai pembelajaran pada masa depan yang tidak menentu dengan metode pembelajaran yang mentransformasi dan membuat peserta didik mempunyai kemampuan berpikir kritis.Kebijakan pendidikan tinggi menganut kolaborasi dan pola pemberdayaan yang memungkinkan setiap perguruan tinggi berperan secara unik dengan berpikir inovatif (*innovative thinking*) untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Kebijakan Pendidikan Tinggi berorientasi menyelesaikan permasalahan pembangunan dengan

mencapai target kemajuan dari Presiden dengan mempersiapkan dan memampukan warga trampil dan produktif termasuk talenta sains dan teknologi,meningkatkan Institusi Perguruan Tinggi yang berdampak dan mengembangkan Ekosistem Penelitian dan Pengembangan,melalui :

1. Akses Pendidikan Tinggi Bermutu,Relevan,dan Berdampak.
2. Pengembangan Talenta,Sains,dan Teknologi.
3. Penumbuhan dan Penguatan Budaya Ilmiah (*Scientific Culture*)Penelitian dan Pengembangan
4. Penyelesaian Permasalahan Sosial dan Ekonomi Nasional.

4.7. Kurikulum Pendidikan Dasar Menengah sebagai Input Pendidikan Tinggi,

Kurikulum *Deep Learning* merupakan kurikulum baru sebagai pengganti Kurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam dan fokus pada keterlibatan aktif. Pendekatan adalah dengan eksplorasi mendalam. Interpretasinya adalah: Kurikulum tersebut dirancang untuk membantu siswa memahami materi secara lebih baik melalui metode yang menekankan

pada pemikiran kritis dan eksplorasi. Hal tersebut memerlukan :

4.7.1. *Mindfull Learning.*

Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar, dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan potensi tiap individu. Dalam pendekatan ini siswa diharapkan dapat terlibat langsung melalui diskusi, eksperimen dan eksplorasi terhadap materi yang diajarkan. Misalnya saat melakukan analisis mengenai konsep konsep Sains, guru diharapkan tidak hanya memberikan teori tetapi juga mengajak siswa memahami peran materi tersebut dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, pembelajaran tentang air dapat dilakukan melalui eksperimen Laboratorium untuk mempelajari peran air dalam kehidupan sehari hari. Dengan pendekatan tersebut, siswa diharapkan mengaitkan pembelajaran di kelas dengan realitas sehari hari mereka.

4.7.2. Meaningfull Learning.

Siswa perlu tahu argumen suatu materi penting dan alasan suatu materi bermanfaat pada suatu kehidupan nyata. Pendekatan tersebut memposisikan guru sebagai fasilitator yang membantu siswa mengaitkan pelajaran dengan penerapan di dunia nyata. Sampel pada Pelajaran Matematika, guru mampu menjelaskan suatu konsep bermanfaat untuk pengelolaan keuangan atau pengelolaan logistik. Dengan pemahaman tersebut siswa dapat termotivasi dan antusias dalam belajar.

4.7.3. Joyfull Learning.

Metode belajar tersebut bukan sekedar pembelajaran yang menyenangkan melainkan sebuah pendekatan yang mengedepankan kepuasan dari pemahaman mendalam. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, sehingga siswa tidak hanya merasa senang tetapi juga benar benar memahami materi yang dipelajari. Sampelnya adalah dalam pelajaran sejarah guru bisa mengadakan simulasi atau diskusi yang membuat siswa lebih aktif terlibat. Dengan metode tersebut siswa bisa

memahami konteks historis secara lebih mendalam. Harapannya siswa dapat lebih bersemangat saat mempelajari setiap pelajaran.

4.8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memberikan Fasilitas beasiswa.

Kementerian berkaitan dengan pendidikan tinggi memberikan fasilitas beasiswa untuk menjalani pendidikan di luar negeri melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kesempatan tersebut jika dimanfaatkan untuk berkarya di luar negeri atau dalam negeri. Sesuai kondisi saat November 2024 pernyataan dari Kementerian bahwa Alumni Penerima beasiswa LPDP jika bekerja di luar negeri tidak harus pulang ke Indonesia untuk mengabdikan diri dikarenakan kondisi dalam negeri belum optimal dalam menyediakan wadah dan peluang untuk berkarya.

4.9. Peran Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Kementerian setelah diorganisasikan pada suatu Nomenklatur yang fokus pada Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program

doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan Kebudayaan Bangsa Indonesia.

Pemahaman penggunaan kata Sains tersebut setara dengan teknologi berdasarkan tata kalimat, dengan sebelumnya penamaan *Science* adalah menggunakan Riset. Pemahaman Riset adalah sama dengan Penelitian. Penelitian tersebut adalah bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari :

1. Pembelajaran.

Proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu Lingkungan Belajar.

2. Penelitian.

Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

3. Pengabdian kepada Masyarakat.

Kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.10. Peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memberikan Akreditasi.

1. Pengertian Akreditasi.

Kegiatan Penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan suatu institusi.

2. Prinsip Akreditasi.

- Akuntabel.

Proses Akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

- Obyektif.

Akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subyektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

- Independen.
Akreditasi pada proses pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri ,bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.
- Transparan.
Proses akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.
- Akurat.
Proses Akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yg jelas,benar,tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.11. Tujuan Akreditasi Pada Institusi Pendidikan Tinggi

Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

❖ Kebijakan Akreditasi.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

1. Tidak terakreditasi
2. Terakreditasi. Kemudian, Perangkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas
 - a. Terakreditasi Baik[C]
 - b. Terakreditasi Baik Sekali[B]
 - c. Terakreditasi Unggul.[A]

Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut :

1. Terakreditasi Baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Terakreditasi Baik sekali dan terakreditasi Unggul yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh BAN PT.

4.12. Kelembagaan Akreditasi.

Untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi membentuk.

4.12.1. Lembaga Akreditasi Mandiri

Merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri. LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.

Lembaga Akreditasi Mandiri dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan rumpun ilmu, pohon ilmu, dan atau cabang ilmu pengetahuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, LAM dibentuk di tempat kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (**LLDIKTI**).

4.12.2. Lembaga Akreditasi Mandiri Pemerintah.

LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi dari BAN-PT (**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**). LAM Pemerintah

merupakan badan Badan Non Struktural di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki Kemandirian.

LAM Pemerintah memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Satu orang ketua merangkap anggota.
- 2) Satu orang sekretaris merangkap anggota.
- 3) anggota.

Anggota LAM Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Sedangkan Ketua dan Sekretaris LAM Pemerintah dipilih dari dan oleh anggota LAM Pemerintah untuk ditetapkan oleh Menteri.

4.12.3. Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat.

LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba yang dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan atau asosiasi unit pengelola program studi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan atau rumpun

ilmu. Adapun susunan organisasi kepengurusan dan tata Kelola LAM Masyarakat diatur dalam anggaran dasar badan hukum nirlaba.

Tugas dan Wewenang LAM :

- 1) Menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam standar Pendidikan Tinggi.
- 2) Melakukan akreditasi Program Studi.
- 3) Menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi.
- 4) Memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan atau peringkat terakreditasi Program Studi.
- 5) Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional.
- 6) Menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi.

- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan.
- 8) Memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi berbadan hukum.
- 9) Menyampaikan Laporan Hasil Akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

4.13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi [BAN-PT].

BAN-PT adalah badan non struktural di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang bertanggungjawab kepada Menteri, untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. BAN-PT

memiliki organ berupa Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Majelis Akreditasi terutama bertugas menetapkan kebijakan dan pengembangan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara Nasional, sedangkan Dewan Eksekutif terutama bertugas melaksanakan kebijakan sistem akreditasi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi.

Adapun tugas dan wewenang BAN-PT :

1. Mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi.
2. Menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan standar pendidikan tinggi.
3. Melakukan akreditasi perguruan tinggi.
4. Menerbitkan, mengubah atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi.
5. Memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat

nasional maupun internasional.

7. Melakukan penilaian kelayakan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM.
8. Mengevaluasi kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri.
9. Menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
10. Memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum terakreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Menyampaikan Laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

4.14. Akreditasi Internasional.

Selain keharusan untuk memperoleh status dan peringkat terakreditasi pada tingkat nasional melalui Lembaga Akreditasi Mandiri dan atau Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi, program studi dan atau perguruan tinggi dapat meminta LAA [Lembaga Akreditasi Asing] yang memiliki kewenangan melakukan akreditasi pada tingkat regional maupun internasional untuk melakukan akreditasi. Dalam hal ini akreditasi regional atau internasional program studi dan institusi perguruan tinggi dimaksud hanya dapat dilakukan oleh Lembaga akreditasi asing yang telah diakui BAN-PT.

4.14.1. Otonomi Perguruan Tinggi.

Sebelum tahun 1998, kendali Kementerian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dengan corak peraturan perundang undangan bidang pendidikan tinggi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Kementerian dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan Ujian Negara, legalisasi ijazah Perguruan Tinggi Swasta oleh Kementerian. Termasuk Model Statuta.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Kementerian di dalam hampir semua sektor

dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 50 ayat 6 UU SISDIKNAS menyatakan bahwa Perguruan Tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

4.15. Peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Kabinet Merah Putih.

Secara umum penyelenggara pendidikan tinggi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun pada Kabinet Merah Putih 2024-

2029 berdasarkan Nomenklatur Kementerian disebut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Didalam pasal

7 ayat (3) huruf CUU DIKTI ditetapkan bahwa Tugas dan Wewenang Menteri penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi Peningkatan Penjaminan Mutu, Relevansi, Keterjangkauan, Pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

4.16. Posisi Kebudayaan pada Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebudayaan pada Kabinet Merah Putih 2024 2029 pada Kementerian Kebudayaan dan mengacu pada Undang Undang Pemajuan Kebudayaan. Untuk pertamakalinya Indonesia memiliki Undang Undang tentang Kebudayaan Nasional. Pada 27 April 2017 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan Pemerintah sebagai acuan legal formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia.

Pendiri Bangsa telah menggunakan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 32 yaitu Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan

bangsa. Saat terjadi perubahan UUD 1945 pada awal masa reformasi melalui proses amandemen pemajuan kebudayaan tetap menjadi prioritas bahkan makin ditegaskan. Pasal 32 UUD 1945 dikembangkan menjadi Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya.

Sepuluh Unsur Kebudayaan menjadi Fokus Utama Pemajuan Kebudayaan, yaitu :

- Seni.
- Teknologi Tradisional.
- Pengetahuan Tradisional.
- Manuskrip
- Bahasa.
- Adat Istiadat.
- Tradisi Lisan
- Olahraga Tradisional
- Permainan Rakyat.
- Ritus.

Berkaitan dengan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan, maka Cita cita Pendiri Bangsa agar Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat berkepribadian secara budaya, berdikari secara

ekonomi serta berdaulat secara politik bisa siap diwujudkan.

Undang Undang Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman Budaya masyarakat Indonesia. Ada lebih dari 700 Suku Bangsa dan Bahasa, beserta adat istiadatnya yang membentuk masyarakat Indonesia. Keragaman inilah yang mendasari Kebudayaan Nasional. Oleh karena dibutuhkan perspektif yang adil dan tidak mengkotak kotakkan dalam melihat budaya masyarakat kita. Setiap unsur kebudaya perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola dan diperkuat itulah sebabnya Undang Undang ini menggunakan pengertian Kebudayaan yang paling netral, ramah, dan terbuka, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat, sehingga Kebudayaan Nasional diinterpretasikan sebagai keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Undang Undang Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya Indonesia, menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, serta menempatkan kebudayaan sebagai haluan penuh nasional.

Penyebarluasan Kebudayaan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Pengayaan keberagaman dilakukan antara lain melalui penggabungan budaya berdasarkan asimilasi, penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi pengetahuan baru, atau kreasi hasil pengembangan budaya sebelumnya (inovasi) dan penyerapan budaya asing. Menjadi bagian dari budaya Indonesia sesuai akulturasi.

BAB V

PENDANAAN PENDIDIKAN

5.1. Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Disamping itu pendanaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yakni penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua/wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai konsentrasi dalam bidang pendidikan. Secara umum manfaat pendanaan pendidikan adalah untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan dari ditingkat satuan pendidikan terendah sampai tingkat perguruan tinggi. Dengan tersedianya pendanaan yang memadai kualitas mutu pendidikan dapat diwujudkan. Dengan demikian dana pendidikan harus tercukupi dan menjadi prioritas utama perhatian pemerintah. Pada Salinan Peraturan menteri keuangan Nomor 80/PMK.02/2009 tentang alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan dalam

anggaran pendapatan dan belanja negara sudah sangat jelas memaparkan jumlah alokasi anggaran pada sub fungsi pendidikan. Yang menjadi fenomena dan pemikiran kita bersama apakah dengan tersedianya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah sudah cukup atau kurang, tentu setiap orang akan memiliki persepsi dan alur pikir yang berbeda tergantung pada kepentingan orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan pendapat Elchanan Cohn (1979:9) yang menyatakan sebagai berikut.

The issues that will concern us in this volume are conveniently grouped into five major categories (major issues in the economics of education):

- 1) *Identification and measurement of the economic value of education*
- 2) *The allocation of resources in education*
- 3) *Teacher's salaries*
- 4) *The finance of education, and*
- 5) *Education planning*

Dari kutipan diatas menyatakan bahwa permasalahan pendanaan/pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam ekonomi Pendidikan. Harapan kedepannya agar diperoleh suatu pemahaman yang utuh dan

komprehensif tentang kerangka umum pembiayaan Pendidikan. Diuraikan dalam pembiayaan pendidikan terdiri dari :

1. biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal;
2. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi :
 - a. biaya ;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap :
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan ;
4. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:
 - a. Gaji pendidik kependidikan dan serta tenaga segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya ;

5. Standar biaya pendidikan operasi ditetapkan satuan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP

Secara umum, pendanaan pendidikan merupakan entitas yang kompleks dengan keterkaitan antara setiap komponen yang memiliki karakteristik tertentu mulai dari satuan pendidikan hingga nasional dengan mekanisme secara efektifif dan efisien. Konsep biaya/pendanaan menurut pendapat para ahli, diantaranya Mulyono (2010;81) menyatakan biaya adalah salah satu unsur yang dapat menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan berpengaruh kepada tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu sekolah dalam mencapai tujuan.

Di samping itu Mulyadi (2014) mengelompokkan konsep biaya pendidikan dalam arti sederhana sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan dalam arti makro biaya pendidikan merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi guna tujuan tertentu.

Dari definisi ini biaya bisa dibagi dalam empat unsur, yakni:

1. pengorbanan sumber ekonomi ;
2. diukur dalam satuan uang ;
3. yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi ;
4. pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Dengan mencermati beberapa pendapat ahli diatas bahwa pendanaan merupakan hal sangat urgent dalam pengembangan dunia pendidikan guna efektivitas dan efisiensi daripada out put yang telah dicanangkan dalam dunia pendidikan

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengatasi kendala dalam pendanaan pendidikan adalah penggalangan dana yang merupakan salah satu sumber daya secara langsung dapat mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sedangkan menurut Dinda (2019) biaya adalah pengorbanan finansial yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran dan secara ekonomi, biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Dinda (2019) bahwa pendanaan pendidikan adalah proses penggunaan pendapatan dan sumber daya yang

tersedia untuk menyelenggarakan dan mengoperasikan lembaga pendidikan dengan tingkat pendidikan yang berbeda di daerah yang berbeda. Menurut Supriyadi (2003) biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Biaya dalam hal ini mempunyai lingkup yang luas berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik berupa uang, barang maupun tenaga. Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang menyelenggarakan pendidikan. disediakan untuk mengelola pendidikan, penyediaan sumber daya pendanaan dibutuhkan agar terselenggaranya pengelolaan pendidikan secara produktif dan efisien. Dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan dikelola sesuai dengan tingkat kebutuhan, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan pendistribusian yang jelas, obyektif dan akuntabel untuk mengantisipasi minus anggaran sebagai fenomena umum yang sering terjadi pada lembaga pendidikan

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai payung hukum

pada Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Demikian juga pada Pasal 47 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkesinambungan. dan Maksud prinsip keadilan di sini adalah bahwa sumber pendanaan ditentukan sesuai kemampuan masyarakat atau daerah yang masing-masing, pemerintah daerah, pemerintah, dan sumber lain pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Dalam pengelolaan dan penggunaan dana harus berdasarkan prinsip kecukupan artinya bahwa dana penyelenggaraan pendidikan mencukupi dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Nomor 19 tahun 2005. Prinsip keberlanjutan dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan juga mewajibkan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menganggarkan dana pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun faktanya amanat ini dimentahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008,

anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN maupun APBD di dalamnya termasuk gaji pendidik. Jika dihitung nominalnya untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan masih minim jumlahnya. Di sebagian besar negara di dunia, pemerintah pusat masih berperan sebagai sumber pendanaan terpenting bagi sektor pendidikan dan selebihnya ditanggung oleh pemerintah daerah atau provinsi. Bahkan di negara-negara maju yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah cukup tinggi untuk membiayai sendiri pada sektor pendidikan, kontribusi pemerintah pusat terhadap pendanaan pendidikan masih cukup besar. Misalnya di negara bagian Texas (Amerika Serikat), 4% biaya pendidikan berasal dari pemerintah federal, 44% berasal dari pemerintah pusat dan 52% lainnya berasal dari sumber-sumber lokal termasuk pemerintah setempat, orang tua dan masyarakat (Reschovsky, 2003:267).

Berdasarkan hasil riset tersebut tentu dapat dijadikan bahan evaluasi sebagai tolak ukur dalam penetapan pengalokasian pendanaan pendidikan di sebuah sekolah. Menurut Fattah (2009) biaya pendidikan digunakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan, seperti gaji tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan peralatan

profesional/ media dan sumber belajar, pengadaan sarana dan prasarana, perlengkapan kantor (ATK), dan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan/ kegiatan akademik/non akademik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya berupa uang, tenaga, atau barang yang secara langsung dapat mendukung efektifitas dari planning manajemen pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat

5.2. Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Dalam Sebuah Jurnal yang di tulis Armida (vol 26 No. 1; 2011) mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh John S. Mrophet, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

1. Flat Grand Model Flat Grand Model menggunakan sistem distribusi dana, Kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap peserta didik tanpa melihat

perbedaan dari kultur sosial budaya suatu daerah. Seperti halnya dalam membiayai program pendidikan setiap menerima dana dengan jumlah nominal yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada lembaga pendidikan

2. Equalization Model Equalization Model

ini bertitik tolak pada *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang *incomenya* lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana manajemen masing-masing daerah. Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah 7 per mil dana dasar daerah. Dari paparan konsep diatas dapat disimpulkan bahwa mengelola pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang obyektif, agar mampu

merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.

Untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan UU otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda seperti penghasilan (PAD) yang sangat rendah, serta kesadaran pada pembangunan investasi pendidikan. Menurut Soedijarto (2006:1) hampir dua tahun MPR RI menetapkan amandemen pasal 31 yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara (pasal 31 ayat (2)) dan kewajiban negara (pemerintah dan DPR) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD (pasal 31 ayat (4) UUD 1945), pada tanggal 26 Januari tahun 2004 mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49% APBN dan secara bertahap akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20% APBN.

Suatu keadaan yang ironis bila dibandingkan dengan perhatian pendidikan di Negara yang maju

seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris Perdana Menteri Blair nyaris terancam mendapat mosi tidak percaya karena masalah pembiayaan pendidikan tinggi. Di Indonesia besarnya uang kuliah hanya ditentukan oleh masing-masing Universitas, sedangkan di Inggris melalui UU yang ditetapkan parlemen. Di Amerika Serikat John Keey memenangkan pemilihan calon presiden partai Demokrat di Iow dan New Hampshire karena tekadnya untuk kembali memperhatikan pendidikan dan kesehatan.

Pendanaan dan anggaran biaya pendidikan dua sisi yang berkaitan satu sama lain yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut (Nanang Fattah, 2006:23) anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh lembaga pendidikan dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Misalnya untuk Sekolah Dasar Negeri, umumnya memiliki sumber anggaran penerimaan, yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidika. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh beberapa komponen yang jumlah dan

proporsinya bervariasi dari waktu ke waktu, baik antar sekolah di daerah maupun daerah yang lain.

Berdasarkan pendekatan unsur biaya (*ingredient approach*) pengeluaran pendidikan di sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu:

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran
2. Pengeluaran untuk tata usaha
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana
4. Kesejahteraan pegawai
5. Administrasi Pembinaan *education* dan teknis perhitungan biaya
6. Pendataan

5.3. Alokasi Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan ada yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Alokasi yang bersumber dari pemerintah berasal dari APBN dan APBD. Jika dilihat dari jumlah APBN dan APBD, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki potensi yang sangat besar dalam mengelola dana pendidikan secara profesional sehingga memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Fattah (2009), pengelolaan dana pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan

mencakup dua aspek, yakni:

1. Dimensi sumber dana; dan
2. Dimensi alokasi dana.

Dimensi penerimaan bersumber dari penerimaan umum pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan sumbangan dari masyarakat, sedangkan dimensi pengeluaran mencakup modal atau anggaran pembangunan (*capital outlay/ expenditure*).

Selanjutnya dalam Nurteti (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan memberikan manfaat antaranya:

1. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien sehingga diperoleh hasil yang maksimal dengan dana minimal tercapai sebuah tujuan tertentu;
2. Tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan (terutama bagi lembaga pendidikan swasta dan lembaga penyedia jasa kursus)
3. Mencegah adanya kekeliruan dan penyimpangan penggunaan dana dari rencana awal

Rencana penetapan jumlah dana dan prioritas yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjadi sangat penting sebagai pengambil kebijakan (Depdiknas: 2009). Pengalokasian dana pendidikan selalu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dilakukan oleh kepala sekolah, guru, siswa, bendahara dan komite sekolah sesuai dengan tahapan penyusunan anggaran maupun pada Institusi Pendidikan (Fatah, 2012).

Perencanaan anggaran memiliki fungsi perencanaan, pemantauan/ pengawasan (*control*) pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, ketepatan penganggaran merupakan salah satu faktor terpenting dalam pendanaan pendidikan (Usman, 2017). Sekolah menyusun RAPBS berdasarkan anggaran rutin, termasuk di dalamnya tenaga kerja, barang dan jasa, pemeliharaan, dan biaya modal. Adapun pengalokasian pendanaan pendidikan dapat dikonsentrasikan sebagai berikut:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pendanaan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional pada satuan pendidikan dasar dan menengah guna mewujudkan

program wajib belajar. Penggunaan Dana BOS dapat dialokasikan pada kegiatan sebagai berikut;

- a. Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
 - b. Pengembangan perpustakaan
 - c. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
 - d. Kegiatan asesmen /evaluasi pembelajaran
 - e. Administrasi kegiatan sekolah
 - f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
 - g. Layanan daya dan jasa
 - h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
 - i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
 - j. Pembayaran honorer atau insentif tenaga pendidik non-ASN.
2. Komite Sekolah (*Stakeholder*)

Komite sekolah organisasi atau merupakan lembaga yang beranggotakan atas orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh atau kelompok masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah dibentuk atas prakarsa dari masyarakat dan sudah diatur dalam UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3

sekolah/madrasah menyatakan sebagai komite lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan berupa memberikan pertimbangan, petunjuk dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian komite sekolah harus mampu menyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat umumnya, bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Salah satu peran sekolah adalah mobilisasi sumbangan dana pendidikan dari orang tua/wali peserta didik. Adapun penggunaan dana komite dialokasikan pada kegiatan sebagai berikut;

- a. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana
 - Pembangunan dan perbaikan toilet siswa
 - Pembangunan sarana olah raga
 - Pembangunan gedung aula
 - Perehaban ruang belajar.
- b. Dana sosial untuk siswa sakit
- c. Penghargaan siswa berprestasi
- d. Beasiswa bagi siswa berprestasi jalur

akademik maupun non akademik

- e. Kegiatan kreativitas siswa
- Karnaval
 - Acara gebyar seni pada kegiatan pengenalan siswa baru
 - Bulan bahasa
 - Expo sekolah
 - Kegiatan hari besar keagamaan
 - Kegiatan hari besar nasional.

Seluruh pengalokasian dana harus selalu dievaluasi dengan tujuan untuk memberikan solusi atas kendala yang dihadapi serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja selanjutnya. Evaluasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Evaluasi terhadap pertanggungjawaban keuangan sekolah dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah. Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan sekolah standar nasional yang salah satunya yaitu membahas tentang standar pembiayaan sekolah seperti yang tertera pada tabel dibawah ini. (Kementrian Pendidikan Nasional 2010).

Daftar Tabel Alokasi Pendanaan Pendidikan

Komponen	Aspek	Jenis Dokumen SNP
Biaya Investasi	Penyusunan RAPBS	Dokumen keterlibatan stakeholders dalam menyusun RKS dan RKAS untuk pengembangan investasi sekolah
	Sarana dan Prasarana	Dokumen rekapan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara keseluruhan
	Pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan	Dokumen pembelanjaan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKAS untuk pemenuhan SNP
Modal Kerja		Dokumen modal

		kerja (operasional) untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan dalam satu tahun terakhir untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
Biaya Operasional	Gaji Pendidik	Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain-lain pendidik pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP
	Gaji tenaga Kependidikan	Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain-lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP
	Kegiatan Pembelajaran	Dokumen pengalokasian Biaya

		untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir untuk pemenuhan SNP
	Kegiatan Kesiswaan	Dokumen pengalokasian dana untuk kegiatan kesiswaan untuk pemenuhan SNP
	ATK	Dokumen pengeluaran Biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran dalam pemenuhan SNP
	Bahan habis pakai	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
	Alat habis pakai	Dokumen pengeluaran biaya

		pengadaan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
	Kegiatan Rapat	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan rapat
	Transport dan perjalanan dinas	Dokumen pengeluaran biaya transport dan perjalanan dinas
	Penggunaan soal soal ujian	Dokumen biaya pengeluaran penggandaan soal ujian
Biaya operasinal	Kegiatan operasional pendidikan tidak langsung	Dokumen pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir
	Sumbangan pendidikan	Dokumen bukti penggunaan sumbangan pendidikan atau

		dana dari masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan
	Uang sekolah	Dokumen pemungutan atau sumbangan uang sekolah
	Subsidi silang	Dokumen subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
	Biaya operasional lain	Dokumen penggalangan biaya operasional lain disamping iuran komite rutin dan fisik sekolah
	Penetapan biaya operasional	Dokumen pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan dengan

		melibatkan berbagai pihak
	Pengelolaan biaya operasional	Dokumen pengelolaan dana dari masyarakat
Transparansi dan akuntabilitas	Pedoman pengelolaan keuangan	Dokumen pedoman pengelolaan keuangan sebagaidasardalam penyusunan RKAS (RAPBS)
	Pembukuan biaya operasional	Dokumen pembukuan biaya operasional
Laporan pertanggung jawaban		Dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya pada pemerintah atau yayasan dokumen hasil audit penggunaan dana

Sumber Data : (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010).

Dari tabel diatas bahwa Alokasi Dana Pendidikan sudah dipaparkan secara jelas dan objektif oleh Kementrian Pendidikan Nasional guna dapat dicermati oleh pendidik dan tenaga kependidikan sebagai informasi penting guna memberikan asupan pemahaman dalam mengelola dan mendistribusikan dana tersebut. Pada sisi yang lain dapat membangun persepsi yang positif dan obyektif bagi dunia pendidikan di Indonesia

Dengan demikian kajian terkait pendanaan/pembiayaan Pendidikan menduduki posisi central dan memiliki nilai esensi dalam upaya pengelolaan manajemen keuangan dalam Lembaga maupun institusi Pendidikan. Lembaga Pendidikan dari Tingkat dasar maupun perguruan tinggi pendanaanlah yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu proses dalam mengembangkan sistem Pendidikan di Indonesia. Dengan demikian bila dana tersebut dapat dikelola dengan baik maka kualitas mutu dapat diwujudkan.

BAB VI

KUALITAS PENDIDIKAN

6.1. Pengantar Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk menilai seberapa baik sistem pendidikan dapat memenuhi tujuan dan menghasilkan lulusan yang kompeten, terampil, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari aspek akademik, tetapi juga dari pengembangan sikap, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Dalam pendidikan, kualitas mencakup aspek-aspek seperti efektivitas pengajaran, relevansi kurikulum, kompetensi pendidik, serta infrastruktur pendidikan yang memadai. Pendidikan berkualitas memiliki tujuan utama untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam berbagai aspek dan memungkinkan mereka berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Tujuan dan Pentingnya Kualitas Pendidikan

Tujuan utama kualitas pendidikan adalah memastikan bahwa seluruh peserta didik, tanpa

memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses terhadap pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk mencapai hasil optimal.

Beberapa manfaat dari pendidikan berkualitas antara lain:

1. Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas Individu
Pendidikan berkualitas membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dan berkontribusi secara produktif.
2. Mendorong Keadilan Sosial
Dengan menyediakan pendidikan yang setara dan berkualitas, sistem pendidikan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan mobilitas sosial.
3. Mendukung Pembangunan Ekonomi
Pendidikan berkualitas menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Membangun Karakter dan Etika
Pendidikan yang berkualitas juga

mengembangkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri peserta didik, seperti integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

Pendidikan berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kita tidak hanya memperbaiki nasib generasi mendatang, tetapi juga memperkuat fondasi bagi kemajuan sosial dan ekonomi.

6.2. Komponen Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian akademik, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran secara menyeluruh. Komponen-komponen ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Berikut adalah komponen utama dalam kualitas pendidikan:

1. Kurikulum yang Efektif dan Relevan
Kurikulum yang baik harus relevan dengan

kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum yang efektif tidak hanya mencakup konten akademik, tetapi juga memperhatikan kemampuan kritis, keterampilan problem-solving, kreativitas, dan nilai-nilai etika yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum yang terus diperbarui memungkinkan peserta didik untuk mempelajari hal-hal yang sesuai dengan perubahan di dunia kerja dan masyarakat.

2. Kompetensi Pendidik dan Pengembangan Profesional

Pendidik merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pencapaian hasil belajar. Kompetensi pendidik yang meliputi pengetahuan, keterampilan mengajar, serta kemampuan manajerial di kelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, pengembangan profesional yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pendidik dapat mengadaptasi metode pengajaran yang inovatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kualitas fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan peralatan teknologi juga berkontribusi besar pada proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan peserta didik untuk belajar dalam lingkungan yang nyaman dan aman, yang juga meningkatkan semangat belajar dan memungkinkan penggunaan berbagai metode pembelajaran.
4. Sumber Daya Pembelajaran
Buku teks, alat bantu pengajaran, serta akses terhadap teknologi dan informasi merupakan bagian penting dari sumber daya pembelajaran yang berkualitas. Sumber daya ini membantu peserta didik dalam memahami materi dengan lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Akses terhadap bahan pembelajaran digital yang beragam juga dapat menyesuaikan kebutuhan dan gaya belajar individu peserta didik.
5. Lingkungan Belajar yang Mendukung
Lingkungan belajar mencakup iklim sekolah yang kondusif untuk perkembangan emosional,

sosial, dan akademik peserta didik. Sekolah yang memiliki suasana mendukung akan memfasilitasi interaksi positif antara pendidik dan peserta didik, membangun rasa aman, dan mengurangi tingkat stres yang bisa menghambat proses belajar. Lingkungan yang inklusif dan menerima keragaman juga meningkatkan rasa saling menghargai di antara peserta didik dari latar belakang yang berbeda.

6. Metode dan Pendekatan Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan sangat mempengaruhi keberhasilan transfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Pendekatan yang interaktif, berbasis proyek, dan kolaboratif cenderung meningkatkan partisipasi aktif dan daya ingat peserta didik. Selain itu, metode yang berpusat pada peserta didik (*student-centered*) membantu peserta didik untuk lebih mandiri, kreatif, dan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan.
7. Manajemen Sekolah yang Efektif
Manajemen sekolah yang baik berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang terorganisasi dengan baik, mendukung pendidik

dan peserta didik, serta berkomitmen pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Kepemimpinan yang efektif, perencanaan yang matang, dan pengelolaan yang profesional dapat memastikan bahwa semua komponen pendidikan bekerja secara sinergis untuk mencapai hasil yang optimal.

8. Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat Peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan memberikan dampak yang signifikan terhadap motivasi dan prestasi peserta didik. Orang tua yang terlibat secara aktif dalam pendidikan anak mereka dapat meningkatkan moral dan semangat belajar anak. Selain itu, dukungan dari komunitas atau masyarakat memberikan tambahan sumber daya serta memperkuat hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar.
9. Evaluasi dan Akreditasi Pendidikan Evaluasi kualitas pendidikan secara rutin dan sistem akreditasi bertujuan untuk mengukur dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan mencakup aspek kurikulum, manajemen, dan prestasi

peserta didik. Sistem akreditasi yang transparan juga memberikan jaminan kepada orang tua dan masyarakat mengenai kualitas sekolah atau institusi pendidikan.

6.3. Indikator Kualitas Pendidikan

Indikator kualitas pendidikan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu sistem pendidikan mencapai tujuannya. Indikator ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan input, proses, dan output pendidikan, serta mencerminkan efektivitas dan efisiensi dari sistem pendidikan tersebut. Dalam prakteknya, indikator kualitas pendidikan membantu pihak terkait, seperti pemerintah, pengelola sekolah, dan masyarakat, untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pendidikan yang diberikan.

Berikut adalah beberapa indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas pendidikan:

1. Indikator Input

Input pendidikan mencakup sumber daya yang digunakan dalam sistem pendidikan, seperti sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, serta kebijakan pendidikan. Indikator input berfokus pada ketersediaan dan

kualitas sumber daya yang mendukung proses pendidikan.

2. Indikator Proses

Indikator proses berkaitan dengan bagaimana pendidikan diberikan dan bagaimana peserta didik berinteraksi dengan kurikulum, pendidik, serta materi pembelajaran. Proses ini mencakup metode pengajaran, kualitas interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta bagaimana pembelajaran dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas.

3. Indikator Output

Output pendidikan mencakup hasil dari sistem pendidikan, yang meliputi pencapaian akademis peserta didik, keterampilan yang mereka peroleh, dan dampak jangka panjang pendidikan terhadap kehidupan mereka.

4. Indikator Outcome

Outcome pendidikan adalah dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari dampak pendidikan terhadap kehidupan peserta didik, serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial-ekonomi suatu negara.

5. Indikator Kualitas Manajerial

Manajemen yang efektif dalam pendidikan berperan besar dalam peningkatan kualitas pendidikan. Indikator manajerial berkaitan dengan kemampuan sekolah atau lembaga pendidikan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan hasil pendidikan.

6.4. Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Meningkatkan kualitas pendidikan adalah tujuan utama dalam setiap sistem pendidikan, karena hal ini berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sosial-ekonomi suatu negara. Berbagai strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari aspek kurikulum, pengajaran, manajemen sekolah, hingga keterlibatan orang tua dan masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa strategi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan:

1. Pengembangan Kurikulum yang Relevan dan Inovatif

Salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan

mengembangkan kurikulum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Kurikulum harus mencakup keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan digital, literasi kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi. Selain itu, kurikulum yang berbasis kompetensi dapat lebih efektif dalam menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Strategi:

- Mengadopsi kurikulum berbasis kompetensi.
- Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

2. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Pengembangan Profesional

Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas pendidik. Oleh karena itu, pengembangan profesional pendidik menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan akan membantu pendidik untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, serta meningkatkan

kemampuan mengelola kelas dan mengadopsi metode pembelajaran yang lebih efektif.

Strategi:

- Menyediakan pelatihan dan kursus pengembangan profesional secara berkala.
- Meningkatkan kualitas program pendidikan calon pendidik.

3. Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pendidikan

Fasilitas fisik yang memadai sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Sekolah harus memiliki gedung yang aman, ruang kelas yang nyaman, serta sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung proses pembelajaran, seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi digital. Infrastruktur yang baik akan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang lebih efektif.

Strategi:

- Meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan sarana pendidikan.
- Memperkenalkan teknologi pendidikan di semua tingkat pendidikan.

4. Penerapan Metode Pembelajaran yang Inovatif
- Metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kolaboratif, berbasis masalah, dan berbasis proyek dapat memotivasi peserta didik untuk lebih aktif belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menarik.

Strategi:

- Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan e-learning, aplikasi pembelajaran, dan video interaktif.
 - Menerapkan pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*) dan pembelajaran berbasis masalah (*Problem-Based Learning*).
5. Meningkatkan Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat
- Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan sangat penting untuk mendukung perkembangan peserta didik. Kolaborasi antara

sekolah dan keluarga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, memberikan dukungan moral, dan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan kontribusi berupa sumber daya, pengetahuan, dan peluang pengembangan untuk peserta didik.

Strategi:

- Membangun kemitraan yang lebih erat antara sekolah dan orang tua melalui pertemuan rutin dan komunikasi yang terbuka.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan pendidikan.

6. Pengelolaan dan Kepemimpinan yang Efektif

Kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang baik di tingkat sekolah sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah dan administrator pendidikan harus memiliki visi yang jelas, kemampuan manajerial yang baik, serta kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi staf pengajar dan peserta didik. Pengelolaan sekolah yang efektif melibatkan perencanaan yang matang,

pengelolaan sumber daya yang efisien, dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

Strategi:

- Melatih kepala sekolah dan pengelola pendidikan dalam kepemimpinan yang berbasis hasil.
- Menggunakan data untuk memantau dan meningkatkan kinerja sekolah.

7. Evaluasi dan Penilaian yang Berkelanjutan

Evaluasi dan penilaian yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada peserta didik, tetapi juga pada kurikulum, pendidik, dan manajemen sekolah. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan inovasi dalam sistem pendidikan.

Strategi:

- Menyusun sistem evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menilai kualitas pendidikan.
- Menggunakan hasil evaluasi untuk merancang kebijakan perbaikan pendidikan.

BAB VII

MASALAH DAN TANTANGAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN

7.1. Pendahuluan

Sistem Sistem pendidikan Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Meskipun alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 20% dari APBN, tantangan besar seperti ketimpangan geografis dan kualitas pendidikan masih menghambat pemerataan akses (Sujatmoko, 2010). Untuk mencerdaskan bangsa dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mampu menjawab berbagai permasalahan sistemik. Ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan terus menjadi isu sentral. Partisipasi sekolah di daerah terpencil jauh lebih rendah akibat minimnya infrastruktur dan kurangnya tenaga pengajar berkualitas. Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Guru Penggerak menawarkan solusi, tetapi efektivitasnya terbatas tanpa dukungan pelatihan intensif dan insentif

yang memadai, khususnya bagi guru di daerah terpencil (Aminah, 2016; Anam, 2024; Pracelia, dkk., 2024).

Selain itu, perubahan kurikulum yang sering terjadi menimbulkan tantangan baru, terutama dalam implementasi yang tidak didukung oleh pelatihan guru yang cukup (Rahimah, 2022; Lihat juga Mukhtar, 2019). Meskipun Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas, tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan teknologi di daerah terpencil membatasi keberhasilannya (Prastowo, 2018; Hermawan, dkk., 2021; Danugroho, 2022; Mustaqim, dkk., 2024; Prayudi dan Taqiyuddin, 2024). Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, investasi pada pendidikan berbasis STEAM, literasi digital, dan kolaborasi dengan sektor industri menjadi prioritas untuk mencetak lulusan yang kompetitif secara global. Dengan sinergi lintas sektor, pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, relevan, dan berdaya saing. Untuk lebih komprehensif akan masalah dan tantangan dalam sistem pendidikan di Indonesia dijabarkan dalam bagian-bagian selanjutnya.

7.2. Ketimpangan Akses Pendidikan

Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia tetap menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan

holistik (Putra, 2018; Purwadinata dan Ridolof, 2024). Meskipun anggaran pendidikan meningkat dan program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah diimplementasikan, disparitas antara perkotaan dan pedesaan tetap nyata (Purwadinata dan Ridolof, 2024). Partisipasi sekolah yang rendah di daerah terpencil mencerminkan kendala mendasar seperti jarak yang jauh ke sekolah, infrastruktur yang minim, dan tekanan ekonomi keluarga. Hambatan ini diperparah oleh kurangnya guru berkualitas dan tantangan geografis, yang menghalangi terciptanya pendidikan yang inklusif. Kebijakan desentralisasi pendidikan belum efektif sepenuhnya, mengingat lemahnya koordinasi pusat-daerah dan keterbatasan anggaran di wilayah tertinggal (Kurniawan, 2022)

Digitalisasi pendidikan membuka peluang untuk mengurangi kesenjangan ini, tetapi tantangan seperti minimnya akses internet, listrik, dan pelatihan guru membatasi dampaknya (Isma, dkk., 2022; Ma'rufah, 2022). Investasi pada infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi prioritas untuk memastikan pemerataan manfaat. Pendekatan lokal seperti "Sekolah Terapung" dan program berbasis komunitas menunjukkan efektivitas solusi berbasis kebutuhan masyarakat (Trisnanto,

2018; Karim dan Bahari, 2024). Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan fokus pada pemerataan teknologi, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan kompetitif, yang menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa yang berkelanjutan.

7.3. Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik

Guru memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional sebagai pendidik, pembimbing, dan pembentuk karakter siswa. Namun, dengan perlunya persentasi guru yang bersertifikasi sesuai standar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kebutuhan akan pelatihan yang relevan menjadi semakin mendesak (Darmawan, 2020; Adnin, 2023). Implementasi kebijakan pengembangan profesional guru masih terkendala keterbatasan akses terhadap program yang efektif, terutama bagi guru di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) (Sairiltiata, dkk., 2023). Ketimpangan distribusi guru juga menjadi masalah serius, dengan sekolah-sekolah di wilayah terpencil sering kali mengandalkan guru honorer yang kurang memiliki kualifikasi memadai, sehingga mengurangi stabilitas dan kualitas pembelajaran.

Kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, juga merupakan tantangan signifikan (Veirissa, 2021; Adiatma, dkk., 2023). Kebijakan tunjangan profesi memang meningkatkan pendapatan, tetapi tanpa pengawasan dan pelatihan yang optimal, dampaknya terhadap motivasi dan efektivitas mengajar tetap terbatas. Dukungan berupa pelatihan berkelanjutan harus diprioritaskan untuk memperkuat kompetensi guru. Selain itu, program seperti Guru Penggerak dan Kurikulum Merdeka memerlukan dukungan infrastruktur dan pelatihan intensif agar benar-benar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di daerah-daerah dengan fasilitas terbatas.

7.4. Kurikulum yang Berubah-Ubah

Kurikulum adalah komponen mendasar yang menentukan arah dan kualitas pendidikan. Di Indonesia, perubahan kurikulum yang sering terjadi dalam dua dekade terakhir, dari Kurikulum 1994 hingga Kurikulum Merdeka, bertujuan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman (Aziz, dkk., 2022; Safitri dan Fajar, 2023). Namun, frekuensi perubahan ini sering kali menimbulkan ketidakstabilan, membingungkan siswa dan guru, serta melemahkan efektivitas sistem pendidikan, terutama di daerah yang

minim sumber daya. Siswa di jenjang transisi harus menghadapi materi dan metode baru, mengganggu kesinambungan belajar, sementara guru dibebani tugas administratif tanpa pelatihan yang cukup (lihat juga Santika, dkk., 2022).

Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan berat di wilayah terpencil, di mana akses teknologi dan pelatihan guru masih terbatas, menghambat implementasinya (Saragih dan Marpaung, 2024). Ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta juga memperbesar jurang kesenjangan pendidikan, bertolak belakang dengan tujuan inklusivitas. Kurikulum ideal harus relevan dengan kebutuhan abad ke-21, mencakup literasi digital, berpikir kritis, dan pembelajaran berbasis proyek. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan berbasis bukti, memperkuat pelatihan guru, serta memastikan stabilitas dan evaluasi berkelanjutan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan generasi yang kompetitif secara global.

7.5. Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan

Infrastruktur pendidikan merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang layak dan berkualitas (Sakinah, 2023). Namun, masih banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, yang

mebutuhkan perbaikan mendesak (Irawan, dkk., 2024). Banyak siswa harus belajar di ruang kelas yang rusak atau tanpa fasilitas dasar seperti toilet dan air bersih, memperparah ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini menyoroti urgensi pembenahan infrastruktur sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

Digitalisasi pendidikan melalui program seperti Digital School dan distribusi perangkat teknologi menawarkan solusi potensial untuk mengurangi kesenjangan ini (Arismunandar, dkk. 2021). Sayangnya, keterbatasan akses internet, listrik, dan pelatihan guru di wilayah terpencil mengurangi efektivitas inisiatif ini. Oleh karena itu, investasi strategis dalam infrastruktur pendidikan perlu disertai pengawasan anggaran yang ketat serta kolaborasi lintas sektor, seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Contoh sukses seperti "Sekolah Terapung" di Kalimantan menunjukkan bahwa sinergi berbagai pihak dapat menghasilkan solusi inovatif (Rohimah, 2022; Trisnanto, 2018). Dengan infrastruktur yang memadai, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan menciptakan generasi kompetitif yang mendukung pembangunan masyarakat berkeadilan.

7.6. Tantangan Literasi dan Numerasi

Tantangan literasi dan numerasi di Indonesia mencerminkan kesenjangan mendasar antara pencapaian pendidikan dan tuntutan dunia modern (Kahar, dkk., 2021). Hasil PISA 2018 yang menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam kemampuan membaca dan matematika menunjukkan bahwa mayoritas siswa belum mencapai kompetensi dasar yang memadai (rigianti dan Situmorang, 2024). Kondisi ini menghambat kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata, termasuk kemampuan membaca kritis dan memahami informasi numerik yang relevan dalam berbagai konteks.

Upaya seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah menjadi langkah awal dalam membangun budaya membaca di kalangan siswa, tetapi keterbatasan sumber daya, terutama di daerah terpencil, masih menjadi kendala utama (lihat juga Dafit dan ramadan, 2020). Minimnya buku berkualitas, pelatihan guru, dan fasilitas pendukung membatasi keberhasilan penerapan kurikulum berbasis STEM, yang dirancang untuk meningkatkan numerasi melalui pembelajaran berbasis proyek (Hadianti, 2024). Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk memperluas budaya literasi, didukung oleh investasi

pemerintah dalam infrastruktur perpustakaan, pelatihan intensif, dan evaluasi berbasis data. Dengan pendekatan yang terintegrasi, tantangan ini dapat diatasi untuk menciptakan generasi yang berpikir kritis, menganalisis informasi secara mendalam, dan berdaya saing global.

7.7. Masalah Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan di Indonesia, meskipun telah mencapai 20% APBN sesuai amanat UUD 1945, masih menghadapi ketimpangan distribusi yang signifikan. Sekolah di daerah 3T hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti perbaikan gedung dan gaji guru honorer, sementara sekolah perkotaan sering mendapat tambahan dukungan masyarakat. Ketidakmerataan ini memperburuk kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menghambat upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas (Basuki, 2021; Paddu, 2024).

Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi tantangan lain yang perlu segera diatasi. Keterlambatan pencairan, birokrasi yang rumit, serta dugaan penyalahgunaan anggaran memperlemah efektivitas program seperti BOS dan KIP (Wahab, dkk.,

2018; Iswanto, dkk, 2024). Reformasi pendanaan melalui sistem digital yang lebih transparan dan evaluasi program menjadi prioritas strategis. Investasi yang lebih besar dalam pelatihan guru, teknologi pembelajaran, dan infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah terpencil, diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan kompetitif. Kolaborasi lintas sektor dapat menjadi katalisator untuk memastikan pendidikan berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

7.8. Tantangan Globalisasi dan Pendidikan 4.0

Globalisasi dan Pendidikan 4.0 menuntut prioritas pada literasi digital dan keterampilan abad ke-21 dalam sistem pendidikan. Literasi digital mencakup kemampuan menganalisis data dan memverifikasi informasi secara kritis, tidak sekadar penggunaan teknologi. Pendekatan STEAM yang mengintegrasikan kreativitas dan pemecahan masalah mulai diterapkan dalam kurikulum, tetapi pelaksanaannya masih terbatas di wilayah perkotaan dengan akses teknologi yang lebih baik, sementara daerah terpencil tertinggal jauh dalam fasilitas dan pelatihan (Adiningsih, 2019; Rifai, 2022)

Kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan pasar kerja modern juga menjadi tantangan

serius. Pendidikan yang berfokus pada hafalan dan teori belum cukup mempersiapkan lulusan untuk revolusi Industri 4.0, yang membutuhkan kecakapan teknologi dan berpikir kritis (Sihotang, 2019). Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan mengindikasikan perlunya kolaborasi erat antara institusi pendidikan dan industri. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah harus memperkuat Kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berbasis proyek dan teknologi, serta memastikan investasi berkelanjutan dalam pendidikan berbasis teknologi dan STEAM, khususnya untuk wilayah tertinggal. Dengan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat mengubah tantangan globalisasi menjadi peluang untuk reformasi pendidikan yang lebih adaptif dan kompetitif.

7.9. Rekomendasi dan Solusi

Mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia memerlukan strategi terpadu yang mencakup transformasi infrastruktur, penguatan kompetensi guru, dan reformasi pendanaan. Pembangunan fasilitas berbasis teknologi di wilayah 3T dapat menciptakan pembelajaran inklusif, sementara pelatihan guru yang didukung teknologi AI memungkinkan personalisasi pengajaran. Pengelolaan dana berbasis blockchain

dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Redefinisi kurikulum yang mengintegrasikan literasi digital, kecerdasan buatan, dan keberlanjutan lingkungan penting untuk mencetak lulusan kompetitif di era Industri 4.0. Kolaborasi dengan sektor industri melalui laboratorium teknologi dan jalur pendidikan dual sistem semakin memperkuat relevansi pendidikan. Distribusi guru berbasis GIS, penguatan literasi dan numerasi melalui teknologi, serta pelibatan komunitas lokal memastikan inklusivitas. Evaluasi kebijakan berbasis analitik data real-time memungkinkan perbaikan tepat sasaran, menciptakan sistem pendidikan adaptif, berdaya saing, dan berkeadilan.

BAB VIII

INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN

Berdasarkan empat skenario pendidikan tahun 2040 yang dirumuskan oleh OECD (2020), terdapat dua karakteristik utama yang akan mendefinisikan pendidikan di masa depan: teknologi digital sebagai pendorong utama dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Fleksibilitas ini mencakup keterlibatan pihak eksternal, seperti komunitas dan sektor swasta, serta integrasi pembelajaran formal dan informal. Hal ini mendorong sektor pendidikan untuk terus berinovasi sehingga mampu mendukung individu dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan perubahan tren global.

Perkembangan teknologi serta dinamika global telah mendorong pesatnya inovasi dalam teknologi pendidikan, khususnya sejak pandemi COVID-19. Teknologi pendidikan, atau EdTech, adalah istilah yang umum digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan alat, proses, sumber daya, dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar di berbagai

lingkungan, seperti pembelajaran formal, informal, seumur hidup, on-demand, di tempat kerja, dan tepat waktu (just-in-time)(R. Huang et al., 2019). Dalam dokumen Statistik Aplikasi Informatika (2023), tercatat bahwa pada tahun 2021 sebanyak 417 sekolah di Indonesia telah mengadopsi teknologi digital melalui program *Proof of Concept* (PoC), dengan teknologi seperti komputasi awan, laboratorium virtual reality, dan analisis berbasis big data. Jumlah ini meningkat menjadi 456 sekolah pada 2022, namun menurun ke 243 sekolah pada 2023. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan bahwa sebanyak 141 ribu sekolah telah menggunakan platform Merdeka Belajar, dengan pengguna aktif mencapai 10,2 juta (Madrin, 2022). Angka ini masih jauh dari kebutuhan untuk menjangkau 53 juta siswa (Rizati, 2023) dan 399 ribu sekolah (Finaka, 2023) di seluruh Indonesia. Terlebih lagi, sektor pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akses dan partisipasi, neoliberalisasi pendidikan, kesejahteraan guru, tata kelola, dan inklusi sosial (Adriany, 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, khususnya dalam aspek akses, partisipasi, dan tata kelola, penerapan kecerdasan buatan dan keterlibatan pihak

eksternal sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi menjadi komponen utama dalam perkembangan EdTech. Bab ini akan berfokus pada pembahasan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan start-up pendidikan sebagai penyedia platform pembelajaran. Kedua isu ini dipilih karena keduanya menjadi elemen penting bagi masa depan pendidikan, seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan tren global.

8.1. Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Teknologi Pendidikan

Salah satu tren dalam teknologi pendidikan saat ini adalah penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). AI merupakan kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia yang mencakup proses seperti belajar (mengumpulkan informasi dan membuat aturan untuk menggunakannya), penalaran (menggunakan aturan tersebut untuk mencapai kesimpulan sementara atau kesimpulan pasti), dan koreksi diri (tahu ketika terjadi kesalahan dan memperbaikinya) (Shah, 2023). Terdapat beberapa jenis AI dengan tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda, namun publik lebih mengenal istilah AI untuk

merujuk pada keseluruhan mesin ini. Secara garis besar, AI dibangun berdasarkan algoritma yang memungkinkan mesin belajar dari sekumpulan data sesuai dengan instruksi yang diberikan dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Proses ini dinamakan sebagai pembelajaran mesin (*machine learning/ML*). Pada praktiknya, proses ini rumit dan melibatkan salah satu dari banyak metode berbeda.

AI sempit (*narrow AI*) dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik dan terbatas, seperti pengenalan suara, sistem rekomendasi, atau pengenalan gambar. Salah satu contoh penggunaannya yaitu rekomendasi video dan lagu serta fitur pengenalan wajah untuk membuka ponsel. Kecerdasan Umum Buatan (*artificial general intelligence (AGI)/strong AI*) merujuk pada jenis AI yang dapat memahami, mempelajari, mengadaptasi, dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai macam tugas, seperti Google Bard dan OpenAI ChatGPT yang kini cukup lazim digunakan di lingkungan pendidikan. Tingkatan tertinggi AI disebut sebagai AI Superintelijen (*Superintelligence AI*), yang digadang-gadang akan melampaui kecerdasan manusia di hampir setiap bidang, termasuk kreativitas ilmiah, kebijaksanaan, dan keterampilan sosial serta diramalkan dapat membentuk representasi dan kesadaran dirinya sendiri. Jenis AI ini

belum ada, dan masih terdapat perdebatan seputar kelayakan dan implikasi etisnya. Saat ini kita berada di antara *narrow AI* dan AGI.

Menurut Yu dan Lu (2021), penggunaan AI dalam pendidikan meliputi lima (5) aspek, yaitu :

1. Dukungan pada lingkungan belajar, merupakan pembangunan infrastruktur dan sistem untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran dengan AI ;
2. Dukungan dalam proses belajar, berupa layanan langsung kepada siswa, seperti diagnosis profil siswa dan menentukan konten pembelajaran yang sesuai profil siswa;
3. Dukungan terhadap penilaian/evaluasi belajar, tidak hanya berkaitan dengan penilaian hasil belajar siswa namun juga mengevaluasi proses pembelajaran cerdas itu sendiri, misalnya apakah target pembelajaran tercapai dengan metode yang diterapkan, apakah lingkungan fisik dan fasilitas di sekolah sudah mendukung, atau memonitor kondisi mental siswa;
4. Dukungan sebagai asisten guru, bertujuan untuk meringankan beban kerja guru terutama yang bersifat administratif, seperti laporan belajar siswa dan laporan pembelajaran per semester;

5. Dukungan bagi manajemen dan pelayanan pendidikan. Tulisan ini akan berfokus pada peran AI bagi siswa dan guru.

8.1.1. Merangkul Kecerdasan Buatan: Guru

Dalam metode pengajaran tradisional, guru memiliki peran yang amat sentral, mulai dari menyusun materi, menyampaikan materi, membimbing siswa, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Selain itu, guru juga harus menangani tugas-tugas administratif, seperti mengelola kehadiran siswa, menyusun rencana pembelajaran, memeriksa dan menilai tugas, hingga mengikuti pelatihan dan mengurus kegiatan sekolah, yang membuat guru seringkali mengalami kelebihan beban kerja hingga kesulitan untuk focus pada tugas utamanya sebagai pengajar dan pendidik.

AI memiliki potensi untuk membantu guru pada tiga aspek :

- 1) Membantu guru dalam tugas sehari-hari yang bersifat rutin;
- 2) Membantu guru dalam mendesain pembelajaran;
- 3) Membantu guru dalam peningkatan kapasitas profesional (Yu dan Lu, 2021).

Guru perlu mengembangkan keterampilan untuk mengintegrasikan substansi dengan teknis sehingga dapat mengoptimalkan AI secara efektif. Beberapa hal yang penting dipelajari oleh guru diantaranya dasar-dasar AI, literasi data, etika AI, integrasi AI dengan pedagogi, AI sebagai alat evaluasi, komunikasi, serta kemahiran teknis (Shah, 2023).

Contoh praktikal penggunaan AI dalam pembelajaran adalah menggunakan GenAI untuk membuat contoh-contoh kongkrit untuk menjelaskan konsep atau teori yang bersifat abstrak atau membuatkan ilustrasi konsep yang sedang dijelaskan sehingga siswa dapat memperoleh gambaran secara visual. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk membantu membuatkan kuis, baik sebagai *pre-test* atau *post-test* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dijelaskan.

8.1.2. Merangkul Kecerdasan Buatan : Siswa

Kemunculan AI tidak hanya mendukung pembelajaran siswa di sekolah formal, namun juga individu yang ingin belajar secara umum, baik yang bertujuan untuk penyetaraan pendidikan,

peningkatan keterampilan, atau sekedar memuaskan rasa ingin tahu. Selain mempersonalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan siswa, Luckin et.al (2016) mendeskripsikan tiga penggunaan AI yang bermanfaat bagi siswa dan pembelajar lainnya. Pertama adalah peran AI sebagai tutor pribadi yang mampu mensimulasikan bimbingan belajar satu lawan satu serta memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan kognitif siswa dan memberikan umpan balik yang tepat sasaran dan tepat waktu, semuanya tanpa harus ada guru yang hadir.

Beberapa AI memberikan kendali kepada siswa atas pembelajaran mereka sendiri untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan pengaturan diri. Ada juga AI yang dirancang untuk menggunakan strategi pedagogis sehingga siswa merasa lebih tertantang. Kedua, AI memfasilitasi kolaborasi antar siswa, khususnya kolaborasi pada pembelajaran yang dilaksanakan secara daring yang biasanya mengalami kendala berupa keterampilan interaksi sosial untuk berkolaborasi secara efektif karena jarang bertemu langsung. Hal ini diatasi dengan memfasilitasi penyusunan

kelompok yang cocok dengan profil siswa atau AI berperan sebagai agen, baik sebagai fasilitator atau teman virtual. Ketiga, menyediakan realitas virtual untuk memberikan pengalaman mendalam belajar di lingkungan yang autentik. Sebagai contoh, kapal selam virtual memungkinkan siswa untuk menelusuri proses alam yang terjadi di bawah laut, menjelajahi pembangkit listrik tenaga nuklir, jaman prasejarah, atau luar angkasa.

8.2. Perusahaan Teknologi sebagai Aktor Baru dalam Pendidikan

Industri *EdTech* (*Educational Technology*) di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan akses pendidikan yang lebih inklusif dan terjangkau. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bab ini, *EdTech* telah berevolusi dari penggunaan alat-alat pengajaran konvensional hingga mencakup teknologi baru seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, simulasi, pembelajaran kolaboratif, jejaring sosial, dan masih banyak lagi. Namun, dalam perkembangannya istilah *EdTech* juga merujuk kepada perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pendidikan, atau yang lebih dikenal sebagai *start-up*

pendidikan. Bagian ini akan lebih banyak membahas definisi yang kedua.

Popularitas *start-up* pendidikan di Indonesia semakin melesat sejak pandemi COVID-19 yang mendisrupsi proses pembelajaran. Penutupan sekolah dan peralihan ke pembelajaran daring sebagai konsekuensi atas pembatasan sosial menyebabkan banyak siswa mengalami *learning loss*, yaitu kehilangan kemampuan yang telah dikuasai sebelumnya atau kesenjangan (*learning gap*) antara kemampuan belajar siswa dengan standar tertentu baik nasional maupun internasional (Sukoco dan Arsendy, 2023). Meskipun pembelajaran daring dilakukan sebagai upaya agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung, hasilnya tidak selalu efektif karena beberapa alasan, seperti kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa, keterbatasan dalam memantau partisipasi dan perkembangan siswa, keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi untuk mengajar secara interaktif, serta ketidaksiapan sekolah dan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran daring.

Aktor di luar pemerintah, termasuk *start-up* pendidikan, berupaya mendukung agar transisi ke pembelajaran jarak jauh berlangsung dengan lebih

efektif. Tercatat ada sekitar 59 *start-up* pendidikan yang beroperasi di Indonesia, dengan jenis jasa/produk mulai dari K-12, professional dan peningkatan keterampilan, penyediaan LMS, pinjaman pendidikan, aktivitas anak, dan pembelajaran bahasa (Tech in Asia, 2023). Sebagai perusahaan teknologi, mereka memiliki keunggulan dalam hal integrasi teknologi dengan pembelajaran, misalnya melalui penyediaan materi pembelajaran yang lebih interaktif dengan pengajar yang berpengalaman, metode evaluasi hasil belajar yang lebih beragam dan kreatif, serta menyediakan *Learning Management System* (LMS) untuk mengelola pembelajaran jarak jauh.

Peran *start-up* pendidikan tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran selama pandemi, namun juga telah mentransformasi pengalaman belajar secara umum. Pasca pandemi, sekolah kembali menerapkan pembelajaran tatap muka langsung dan mengkombinasikannya dengan alat dan strategi pembelajaran daring (*blended learning*). Menjamurnya kelas-kelas daring yang disediakan oleh *start-up* pendidikan juga membantu masyarakat mengenyam pendidikan informal, baik bagi mereka yang ingin menambah keterampilan, mempelajari hal baru, atau mengambil sertifikasi.

8.3. Tantangan Inovasi dan Teknologi Pendidikan di Era Digital

Meskipun penggunaan kecerdasan buatan dan keterlibatan *start-up* dalam sektor pendidikan menjadi terobosan baru yang membawa sejumlah manfaat, keduanya juga menimbulkan permasalahan dan tantangan baru yang perlu dicermati secara kritis. AI memungkinkan personalisasi pembelajaran dan efisiensi, namun masih terdapat kekhawatiran terkait prinsip-prinsip etika yang hingga kini masih menjadi perdebatan, misalnya terkait privasi dan data pribadi siswa, bias algoritma, dan bagaimana keputusan yang diambil oleh mesin dapat memengaruhi masa depan pendidikan.

Salah satu manfaat AI di sektor pendidikan yang paling sering diunggulkan yaitu AI mampu meningkatkan pencapaian pembelajaran siswa sekaligus mengurangi ketidakadilan dengan memungkinkan siswa belajar dengan cara yang lebih personal sesuai dengan karakteristik dan kemampuan/kecepatan belajar siswa. Holmes dan Porayska-Pomsta (2023) menuturkan bahwa bias algoritma pada penggunaan AI di sektor pendidikan dimulai dari metrik yang digunakan untuk menentukan “keadilan”. Para pembuat algoritma pendidikan

menggunakan pendekatan berbasis kelompok (*group-based approach*) untuk mengonseptualisasikan keadilan, yaitu dengan mengevaluasi bagaimana performa algoritma saat dihadapkan dengan berbagai kelompok dengan demografi yang berbeda-beda. Misalnya, jika suatu algoritma digunakan untuk memprediksi ketercapaian target belajar oleh siswa, pengembang akan menilai apakah model yang dibangun terbukti akurat bagi semua grup, mulai dari pelajar berjenis kelamin laki-laki, pelajar perempuan, pelajar yang sekolah di area pedesaan, pelajar di area perkotaan, dan sebagainya. Jika algoritma bekerja dengan baik pada satu grup namun tidak akurat di kelompok lain, maka pengembang akan melakukan penyesuaian terhadap model.

Dengan cara kerja demikian, pendekatan berbasis kelompok cenderung oversimplifikasi kategori demografi ke dalam abstraksi matematika, mengabaikan konteks sosial dan historis yang membuat beberapa kelompok dalam posisi yang tidak diuntungkan secara sistematis (Hanna et al., 2020). Misalnya pengkategorian secara jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Semua individu yang berada di kelompok “perempuan” dianggap sama dan dapat diperbandingkan, padahal masing-masing anggota di

kelompok “perempuan” juga memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda dan tidak dapat diseragamkan atau digeneralisasi begitu saja hanya karena mereka memiliki kesamaan sebagai perempuan. Generalisasi dalam pendekatan ini mempertanyakan klaim keadilan dan personalisasi belajar oleh AI karena pada akhirnya AI tidak benar-benar memberikan pengalaman belajar yang terpersonalisasi bagi semua individu.

Selanjutnya, Burch dan Miglani (2018) menyebutkan bagaimana data dan luaran pembelajaran menjadi focus utama pada pendidikan berbasis AI, dimana teknologi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis performa siswa. Meskipun cara ini dapat membantu memonitor perkembangan siswa, terlalu berorientasi pada luaran kuantitatif menyebabkan pengabaian terhadap aspek kualitatif dan esensi dari pendidikan itu sendiri, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan perkembangan sosial siswa. Tidak hanya siswa, namun guru pun ikut terbebani dengan target-target kuantitatif ini. Isu selanjutnya terkait dengan privasi dan data pribadi siswa. Pengumpulan data siswa yang terlampau banyak berpotensi digunakan untuk keperluan yang bahkan tidak terkait dengan praktik pendidikan, sehingga pertanyaan yang

penting untuk diajukan adalah sejauh mana data pribadi akan digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan apakah siswa mendapatkan manfaat pendidikan yang sepadan dengan data yang mereka berikan (Holmes & Porayska-Pomsta, 2023). Selain potensi kebocoran data serta penegakan regulasi perlindungan data, monopoli data oleh platform penyedia teknologi pembelajaran serta penyimpangan dari maksud awal pengumpulan data juga menjadi tantangan privasi yang perlu diperhatikan. Data siswa yang diperoleh oleh bisnis-bisnis ini dapat diubah menjadi data yang berbeda dari bentuk aslinya dan digunakan untuk tujuan mencari keuntungan, misalnya sebagai informasi untuk membuat iklan tertarget (L. Huang, 2023).

Burch dan Miglani (2018) juga mengkritik gelombang gerakan keterlibatan *start-up* secara besar-besaran sebagai praktik neoliberalisme dan teknosentrisme. Kerangka neoliberalisme memperlakukan pendidikan sebagai komoditas, di mana sekolah dan lembaga pendidikan bertindak seperti bisnis, dan siswa serta orang tua dianggap sebagai konsumen. Pendekatan yang digerakkan oleh pasar ini menekankan persaingan dan keuntungan, seringkali dengan mengorbankan kesetaraan dan akses,

terutama bagi populasi yang kurang beruntung. Sekolah dan siswa dengan sumber daya berlebih mampu membeli/mendatangkan teknologi dan alat pendidikan yang lebih baik, sementara sekolah dan siswa dengan keterbatasan harus berjuang dengan infrastruktur seadanya. Praktik neoliberalisme oleh *start-up* pendidikan di Indonesia dijelaskan oleh Windiato (2022). Ia menyebutkan bahwa praktik eksploitasi pengajar rentan dilakukan, mulai dari beban kerja berlebih, tingginya ekspektasi, ruang gerak yang dibatasi peraturan yang terlalu ketat, hingga kompensasi yang tidak sepadan.

Sementara teknosentrisme kecenderungan terlalu mengandalkan teknologi sebagai solusi atas segala permasalahan dapat mendorong ketergantungan berlebihan pada teknologi digital, yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan pendidikan holistik. Paradigma ini terlihat dari berkurangnya peran guru secara drastis karena guru dipandang sebatas pengguna teknologi, bukan sebagai aktor yang berperan aktif dalam pendidikan. Peran guru tidak lagi dipandang dari bagaimana mereka membantu siswa untuk memahami pelajaran atau bagaimana mereka terkoneksi dengan siswa, tapi lebih ke bagaimana mereka bisa memanfaatkan data siswa untuk mengembangkan

kualitas pembelajaran atau bagaimana mereka bisa mengoperasikan alat-alat digital untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa (Burch & Miglani, 2018). Hal ini membuat posisi guru sebatas “fasilitator”, bukan lagi “pendidik”. Pada akhirnya, guru menjadi termarginalkan dalam pendidikan itu sendiri.

Di sisi lain, kerentanan psikologis juga muncul ketika siswa dan guru harus beradaptasi dengan teknologi digital, seringkali tanpa dukungan emosional atau kesiapan mental yang memadai, sehingga meningkatkan risiko stres dan kelelahan mental dalam proses pembelajaran daring yang terus berkembang. Siswa yang menjalani pembelajaran daring dilaporkan memiliki tingkat kesepian yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman sebaya mereka yang mengambil kelas yang sama secara luring serta merasa pembelajaran daring mereka kurang terkoneksi dan kurang memiliki hubungan interpersonal (Ali dan Smith, 2015; Driver, 2018, dalam Kaufmann dan Vallade, 2022). Kesepian secara langsung mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring, yang pada gilirannya mempengaruhi prestasi akademik (Mizani et al., 2022).

Pendidikan perlu mengikuti perkembangan global agar mampu menghasilkan individu yang relevan

dengan kebutuhan zaman. Adaptasi terhadap perubahan global, seperti digitalisasi, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan globalisasi pasar kerja, menuntut pendidikan untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan isu-isu tersebut. Hal ini penting agar siswa mampu bersaing, fleksibel, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Namun, penggunaan teknologi di sektor pendidikan tidak boleh mengalihkan fokus utama pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan kualitas manusia, apalagi justru dijadikan alat untuk eksploitasi dan diskriminasi.

BAB IX

PENDIDIKAN KARAKTER

9.1. Apa itu Pendidikan Karakter?

Pendidikan karakter adalah pilar fundamental dalam membentuk individu yang bermoral, berintegritas, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui proses pendidikan formal, informal, dan nonformal, nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab ditanamkan secara sistematis. Peran guru dan sekolah menjadi krusial, terutama ketika keluarga dan tempat ibadah kurang optimal dalam menanamkan nilai-nilai ini (Lickona, 1992; Pala 2011). Di Indonesia, pendidikan karakter memiliki landasan strategis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diperkuat oleh Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial, ke dalam pembelajaran berbasis proyek serta aktivitas formal dan ekstrakurikuler, meski pelaksanaannya menghadapi kendala, seperti kurangnya pelatihan guru dan dominasi orientasi akademik kuantitatif.

Relevansi pendidikan karakter semakin kuat di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan iklim. Nilai-nilai seperti kreativitas, ketahanan, dan empati perlu diintegrasikan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi kompleksitas abad ke-21 (Komara, 2018). Pendekatan multikultural yang menghormati keberagaman budaya dan agama menjadi kunci menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis (hakim dan Darajat, 2023). Dengan kolaborasi lintas sektor dan integrasi nilai-nilai lokal serta global, pendidikan karakter dapat menjadi fondasi kokoh dalam membentuk generasi yang tidak hanya berkontribusi positif secara lokal, tetapi juga kompetitif di kancah internasional.

9.2. Landasan Filosofis dan Teoritis Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila dan warisan tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, yang menekankan peran guru sebagai teladan moral melalui filosofi *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani* (Putri, dkk., 2024; Suwahyu, 2018). Bertujuan membentuk individu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, pendidikan ini juga memperkuat identitas budaya dan

kompetensi sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan pendekatan holistik, pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan nilai-nilai seperti gotong royong dan saling menghormati, dan Pancasila tetapi juga menanamkannya melalui praktik nyata, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pengabdian masyarakat (Antari, dkk., 2020; Sudrajat & Hasanah, 2020).

Secara teoritis, pendidikan karakter dipengaruhi oleh tahapan perkembangan moral Kohlberg dan teori Social Learning Bandura, yang menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam pembentukan nilai (Kohlberg & Hersh, 1977; Bandura, 1969) dan melihat juga pada enam tahap perkembangan moral yang terbagi dalam tiga level: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional (Lihat juga Reysen, dkk., 2017). Di era globalisasi dan digitalisasi, pendidikan karakter harus adaptif dan relevan, seperti yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka melalui pendekatan berbasis proyek yang menanamkan kerja sama dan tanggung jawab sosial (Hamzah, dkk., 2022; Mustoip, 2023). Peran keluarga dan masyarakat menjadi pilar penting dalam memastikan keberlanjutan pembentukan karakter (Ainiyah, 2013; Suyitno, 2012; Sulhan, 2018;

Saputra, dkk., 2023). Dengan landasan filosofis, teoritis, dan pendekatan inovatif, pendidikan karakter di Indonesia mampu menjembatani nilai-nilai lokal dengan tantangan global, menciptakan generasi yang siap menghadapi dinamika zaman.

9.3. Kebijakan Pendidikan Karakter di Indonesia

Pendidikan karakter di Indonesia telah menjadi prioritas kebijakan nasional sejak awal reformasi, dengan pijakan utama pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya membentuk individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Momentum penguatan pendidikan karakter terlihat pada implementasi Kurikulum 2013, yang mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam proses pembelajaran, serta pada program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diperkenalkan pada 2016 (Kemdikbud, 2017; Nurhayati, 2017; Sholekah, 2022). Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai seperti religiusitas, nasionalisme, gotong royong, kemandirian, dan integritas melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat (Mu'in, 2019).

Kurikulum Merdeka memberikan paradigma baru dalam pendidikan karakter dengan pendekatan berbasis proyek yang memungkinkan siswa menginternalisasi nilai-nilai moral melalui aktivitas praktis seperti kerja sama tim dan kontribusi sosial (Kemendikbudristek, 2022; Putri, dkk., 2023; Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2024). Kebijakan ini diperkuat oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental dan inisiatif Nawacita Presiden Joko Widodo, yang menekankan pentingnya membangun masyarakat bermoral dan berintegritas (Pusat Penguatan Karakter, 2017; Wahyuni & Barat, 2018; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017; 2018; Mulyasa, 2017). Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan pemahaman pendidik, keterbatasan sumber daya di daerah terpencil, dan pengukuran keberhasilan pendidikan karakter (Darmayanti & Wibowo, 2014; Jaelani & Asvio, 2019; Mulyasa, 2022; Sagala, dkk., 2024; Munandar, dkk., 2023). Untuk memastikan keberlanjutan, pendidikan karakter memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan evaluasi berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman (Fadilah, dkk., 2021; Munandar, dkk., 2023).

9.4. Dimensi Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter di Indonesia berlandaskan 18 nilai utama yang dirumuskan dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018, dengan tujuan membentuk individu berintegritas, bermoral, dan berkontribusi positif bagi masyarakat (lihat tabel 1). Nilai-nilai ini mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan kebangsaan untuk mencetak generasi dengan kepribadian utuh yang siap menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat perannya dalam pembangunan bangsa.

Tabel 18 Nilai Utama Dalam Pendidikan Karakter

No.	Nilai	Keterangan
1	Religiusitas	Religiusitas mencakup pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini mendorong peserta didik untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama manusia. <i>Contoh:</i> Siswa melaksanakan doa bersama sebelum dan

		sesudah pelajaran.
2	Kejujuran	Kejujuran adalah sikap konsisten dalam berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Nilai ini membangun kepercayaan dan integritas individu. <i>Contoh:</i> Siswa tidak menyontek saat ujian.
3	Toleransi	Toleransi mencerminkan sikap menghormati perbedaan agama, budaya, suku, dan pandangan. Nilai ini penting untuk menjaga keharmonisan di masyarakat yang beragam. <i>Contoh:</i> Siswa menghormati agama lain, diskusi kelas secara positif.
4	Disiplin	Disiplin adalah kemampuan untuk menaati aturan dan mengatur diri sendiri secara konsisten. <i>Contoh:</i> Siswa datang tepat waktu ke sekolah.
5	Kerja Keras	Kerja keras mencerminkan usaha maksimal dalam mencapai tujuan, tanpa mudah

		menyerah. <i>Contoh:</i> Siswa belajar dengan tekun untuk memahami materi sulit.
6	Kreativitas	Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide atau solusi baru yang inovatif. <i>Contoh:</i> Siswa menciptakan proyek sains yang unik seperti daur ulang sampah menjadi produk bernilai.
7	Kemandirian	Kemandirian adalah kemampuan mengambil keputusan dan bertindak tanpa tergantung pada orang lain. <i>Contoh:</i> Siswa menyelesaikan tugas tanpa menunggu bantuan.
8	Demokrasi	Demokrasi mengajarkan penghormatan terhadap hak orang lain dan pengambilan keputusan bersama. <i>Contoh:</i> Siswa melakukan pemilihan ketua kelas secara adil.
9	Rasa Ingin Tahu	Rasa ingin tahu adalah sikap aktif untuk belajar dan

		memahami hal-hal baru. <i>Contoh:</i> Siswa bertanya kepada guru untuk memperdalam materi.
10	Semangat Kebangsaan	Semangat kebangsaan mencerminkan kebanggaan dan cinta terhadap identitas bangsa. <i>Contoh:</i> Siswa ikut serta dalam upacara bendera dengan khidmat.
11	Cinta Tanah Air	Nilai ini menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap negeri. <i>Contoh:</i> Siswa menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
12	Penghargaan terhadap Prestasi	Penghargaan terhadap prestasi mendorong apresiasi atas usaha dan hasil yang dicapai, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. <i>Contoh:</i> guru memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perkembangan belajar.
13	Komunikatif	Komunikatif adalah kemampuan menyampaikan

		gagasan dengan jelas dan mendengarkan orang lain dengan baik. <i>Contoh:</i> Siswa aktif berdiskusi dalam kelompok belajar.
14	Cinta Damai	Cinta damai adalah sikap menghargai perbedaan dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. <i>Contoh:</i> Siswa menyelesaikan perbedaan pendapat melalui diskusi damai.
15	Gemar Membaca	Gemar membaca adalah kebiasaan mencari pengetahuan melalui bahan bacaan. <i>Contoh:</i> Siswa mengunjungi perpustakaan secara rutin.
16	Peduli Lingkungan	Peduli lingkungan mencerminkan kesadaran untuk melestarikan alam dan menjaga kebersihan. <i>Contoh:</i> Siswa mengikuti program daur ulang sampah di sekolah.
17	Peduli Sosial	Peduli sosial adalah sikap empati dan berbagi dengan

	<p>orang lain yang membutuhkan. <i>Contoh:</i> Siswa menggalang dana untuk teman yang sakit.</p>
<p>18 Tanggung Jawab</p>	<p>Tanggung jawab adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi kewajiban dengan baik. <i>Contoh:</i> Siswa menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu.</p>

Pendidikan karakter dengan integrasi holistik ini adalah dalam rangka untuk membentuk individu yang bermartabat dan kompeten secara global (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018; Rohmah, dkk., 2023; Azmi, 2018; Qorib, 2020). Dengan pendekatan berbasis pengalaman seperti proyek dan layanan masyarakat, peserta didik diajak mempraktikkan nilai-nilai seperti religiusitas dan gotong royong dalam konteks nyata (Nasution dan Masyitoh, 2024; Cahyani, dkk., 2024). Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat

memastikan keberlanjutan pendidikan karakter, menghasilkan generasi yang bertanggung jawab secara sosial, adaptif terhadap globalisasi, dan mampu memimpin dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan (Iswatiningsih, 2019; Solissa, dkk., 2024; Kurdi, 2021; Jatiyasa, dkk., 2024; Iskandar, dkk., 2023; Iswahyudi, dkk., 2023).

9.5. Metode dan Strategi Pengajaran Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter membutuhkan strategi holistik yang mencakup pendekatan kontekstual, pembelajaran berbasis pengalaman, dan integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum untuk membentuk individu yang bermoral dan bertanggung jawab (Nuryani, dkk., 2021; Wulandari, 2021; Hulawa, 2022). Pendekatan seperti *experiential learning* dan *problem-based learning* memungkinkan siswa mempraktikkan nilai-nilai karakter melalui aktivitas nyata, seperti proyek layanan masyarakat atau diskusi kasus sosial, yang mengembangkan empati, kerja sama, dan pengambilan keputusan etis (Kurdi, dkk., 2020; Jatiyasa, dkk., 2024; Jatiyasa, dkk., 2021; Mustoip, dkk., 2024). Di samping itu, metode seperti cerita inspiratif, diskusi kelompok, dan role-playing memperkaya pembelajaran

dengan memberikan pengalaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral (Atikah, dkk., 2024; Musyawir, dkk., 2024; Harisah, 2024).

Keterlibatan keluarga dan komunitas juga menjadi elemen kunci, memastikan pendidikan karakter tidak hanya diajarkan di sekolah tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Yuwono, 2020; Maisaroh dan Untari, 2024; Yusuf, 2024). Lingkungan sekolah yang kondusif, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran berbasis nilai, serta evaluasi yang mencakup perilaku dan pengembangan karakter siswa semakin memperkuat efektivitas pendidikan karakter (Perdana, 2018; Kurdi, 2021; Iskandar, dkk., 2023; Jatiyasa, dkk., 2024; Rostini, dkk., 2024). Dengan pendekatan komprehensif ini, pendidikan karakter dapat melahirkan generasi yang unggul secara moral, sosial, dan intelektual untuk menghadapi tantangan global.

9.6. Penguatan Pendidikan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka

Penguatan pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka menjadi pilar utama untuk membentuk generasi yang unggul secara intelektual, moral, sosial, dan emosional. Dengan pendekatan fleksibel, kontekstual, dan berbasis proyek, kurikulum ini

dirancang untuk menanamkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan kesadaran sosial yang relevan dengan tantangan global (Retnaningsih dan Khairiyah, 2022; Saputri, 2024; Cahya, 2024). Pendekatan fleksibel memungkinkan siswa mengeksplorasi potensi mereka melalui pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan, sementara metode kontekstual mengaitkan nilai-nilai karakter dengan situasi nyata, seperti gotong royong dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari (Aminah, dkk., 2022; Sarnoto, 2024).

Pembelajaran berbasis proyek menjadi strategi kunci, memberikan siswa kesempatan untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter melalui aktivitas kolaboratif dan kreatif, seperti proyek sosial yang memperkuat solidaritas dan empati (Hadian, dkk., 2022). Melalui dimensi Profil Pelajar Pancasila—beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif—pendidikan karakter tidak hanya menjawab kebutuhan lokal tetapi juga mempersiapkan generasi yang berdaya saing global (Hayati dan Fadriati, 2023; Rohmad, dkk., 2023; Rusli, dkk., 2024).

Dimensi ini mencerminkan perpaduan nilai lokal dan global, seperti toleransi, tanggung jawab, dan

inovasi, yang relevan dengan tantangan modern. Implementasi dilakukan melalui pendekatan lintas kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, di mana pembelajaran tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga praktis, seperti proyek sosial dan program lingkungan, yang melatih siswa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata (Kemdikbud RI; Pratama dan Dewi, 2023). Kurikulum Merdeka mengintegrasikan dimensi Profil Pelajar Pancasila dalam semua aspek pembelajaran, mulai dari mata pelajaran hingga kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan debat (Kemdikbud RI; Rudiawan dan Cahyono, 2022). Kurikulum Merdeka mengintegrasikan pendidikan karakter sebagai inti pembelajaran, menciptakan generasi yang kompeten, bermoral, dan mampu menghadapi dinamika dunia modern.

BAB X

PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

10.1. Pengertian Peran Masyarakat

Peran adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Lebih tegas, peran merupakan keterlibatan pikiran, mental dan perasaan seseorang (Hartono, 2012), menggunakan segala kemampuannya terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatannya.

Sedangkan, pengertian masyarakat adalah suatu kesatuan-kesatuan manusia. Kata masyarakat dalam bahasa Arab “*syaraka*” mempunyai pengertian “ikut serta, berpartisipasi”. Abdusyani mengatakan bahwa masyarakat artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya, berkumpul bersama, hidup bersama, dengan saling mempengaruhi, selanjutnya dalam bahasa Indonesia menjadi kata “masyarakat”. Poerdarminta mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu (Abdusyani,

2006). Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya (Koentjoroningrat, 2000).

Peran masyarakat yaitu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk memajukan sesuatu dengan cara-cara tertentu. Masyarakat terlibat dalam program pemberdayaan di mulai dari proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya, mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2007).

10.2. Relasi Masyarakat dan Pendidikan

Keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat masih belum disadari oleh pihak lembaga pendidikan maupun masyarakat, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran masyarakat dalam dunia pendidikan. Bagi masyarakat awam mereka beranggapan bahwa lembaga pendidikan adalah lingkungan yang berbeda dengan masyarakat dan bukan menganggap tanggungjawab dari

masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat melalui kenyataan masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan siswa atau peserta didik hanya kepada para guru (I Nyoman Temon Astawa, 2017). Sedangkan di pihak lembaga pendidikan belum memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung dan bersama dalam proses pendidikan walaupun ada hanya sebatas keterlibatan secara materi sedangkan secara fisik dan psikis belum dilibatkan secara maksimal (Nurhasanah, 2017).

Lembaga pendidikan harus selalu berusaha untuk menjalin relasi kerjasama yang baik dengan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam merumuskan pengelolaan lembaga pendidikan serta yang menjadi pemantau proses pendidikan (Nurhasanah, 2017). Elsbree dalam Mulyono (2008:202) mengatakan bahwa lembaga pendidikan harus menjalin relasi yang baik dengan masyarakat, karena masyarakat menuntut adanya perubahan dalam pendidikan dan perlunya bantuan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Komunikasi dua arah yaitu dari lembaga pendidikan ke masyarakat dan dari masyarakat ke lembaga pendidikan adalah untuk saling memberi informasi dan berpartisipasi dalam membina proses pendidikan. Pemikiran dalam pengembangan

pendidikan tidak selalu harus datang dari lembaga pendidikan dan tidak menutup kemungkinan ide-ide dari masyarakat dapat diterapkan dalam proses pendidikan karena tidak semua program atau ide dari lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hubungan komunikasi dua arah ini sangat efektif dalam pengembangan proses pendidikan apabila benar-benar diterapkan oleh kedua belah pihak (Nurhasanah, 2017).

Abdul Hadis dan Nurhayati (2010:3) dalam bukunya Manajemen Mutu Pendidikan menyampaikan bahwa tanpa adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak lembaga pendidikan tidak akan mampu berjalan sendiri dalam menjalankan proses belajar mengajar agar dapat menghasilkan peserta didik yang bermutu. Belum lagi tuntutan peningkatan mutu yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Salah satu merosotnya mutu pendidikan karena kurang memaksimalkan komunikasi dan informasi dalam dunia pendidikan termasuk di dalamnya menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat.

10.3. Landasan Peran Masyarakat dalam Pendidikan

Peran masyarakat sangat diperlukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Peran masyarakat dapat juga dilakukan secara individu atau kelompok, spontanitas atau terorganisir, dilakukan secara kontinnyu atau sesaat. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap seringkali tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, karena masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui yang menjadi permasalahan mereka serta mengerti cara bagaimana mengatasi permasalahan mereka (Heningtyas et al., 2014). Begitupun juga dalam pendidikan sangat diperlukan peran masyarakat yang dapat menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.

Peran masyarakat dalam pendidikan merupakan amanah Undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program kerja pendidikan serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Lutfiyah, 2013). Dalam UU Sisdiknas, pendidikan harus dilakukan secara

demokratis dengan melibatkan peran masyarakat dalam proses pendidikan dari awal sampai akhir.

Dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, berarti bagi setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Kebijakan ini juga secara otomatis memberikan kebebasan bagi pengelolaan pendidikan. Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.

Peluang besar bagi lembaga pendidikan dengan adanya desentralisasi pendidikan yang memberikan kebebasan bagi lembaga pendidikan untuk mengelola lembaganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya dan menjadi cikal bakal munculnya teori dan aplikasi manajemen berbasis sekolah (MBS) yang menuntut peran masyarakat secara maksimal di dalamnya. Paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil

adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama (Nurlina, 2018).

Dengan adanya kebijakan desentralisasi tersebut salah satu konsekuensi dalam penyelenggaraan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah menanti keterlibatan masyarakat secara keseluruhan yaitu orangtua siswa, masyarakat sekitar sekolah, pengusaha organisasi sosial kemasyarakatan dan pemerintah dalam penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan harus dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat baik dari segi pemikiran, tenaga, pembiayaan serta pemecahan masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan (Maisyaroh, 2011:116).

Demikian juga seperti yang disampaikan Dirjen Dikdasmen bahwa penyaluran aspirasi serta kontribusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), di tingkat kota/kabupaten dinamakan Dewan Pendidikan dan tingkat sekolah dinamakan Komite Sekolah (Depdiknas, 2002). Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/V/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah maka otonomi sekolah bermitra kerja dengan Komite Sekolah. Peran Komite Sekolah

memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat. Di samping itu, juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu, melakukan kerja sama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua peserta didik dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dan melakukan evaluasi.

10.4. Implikasi Peran Masyarakat Dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, maka pendidikan akan semakin berhasil dengan maksimal. Meningkatkan peran serta masyarakat memang sangat erat berkaitan dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan.

Pembangunan kualitas pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama tidak hanya bagi kaum pemerintah dan para pendidik tetapi juga perlu melibatkan masyarakat, karena masyarakat memiliki

peran penting untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang berkualitas. Meningkatkan peran serta masyarakat memang sangat erat berkaitan dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai, kapan rasa memiliki, kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan (I Nyoman Temon Astawa, 2017).

Peran Masyarakat dalam pendidikan dapat berupa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan dukungan sumber daya bagi lembaga-lembaga pendidikan.

1. Perencanaan

Dalam perencanaan penyelenggaraan pendidikan, maka lembaga pendidikan harus juga melibatkan masyarakat untuk merencanakan program-program pendidikan yang akan dilaksanakan. Sehingga, masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab dan menjadi bagian dalam pendidikan.

2. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan pendidikan masyarakat harus diberikan kepercayaan dan

tanggungjawab sesuai proporsinya untuk berperan melaksanakan pendidikan, baik di lembaga pendidikan maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri (keluarga). Sehingga, masyarakat bukan hanya melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan kepada lembaga pendidikan, namun masyarakat juga mengambil bagian dalam melaksanakan pendidikan.

3. Pengawasan

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi lembaga pendidikan dapat menjadi acuan semangat bagi lembaga pendidikan untuk terus menjaga kualitas pelaksanaan pendidikan dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

4. Evaluasi

Dengan terlibatnya masyarakat dalam evaluasi pendidikan, maka masyarakat juga akan membantu dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

5. Dukungan sumber daya dan dana

Masih banyak di sejumlah daerah atau lembaga pendidikan, baik sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah negeri yang masih

sangat membutuhkan perhatian dan bantuan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan, masih sangat minimnya sumber dana yang didapatkan baik dari pemerintah maupun bantuan yayasan/penyelenggaran pendidikan. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan dengan memberikan dukungan sumber daya dan dana dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Masyarakat dapat berperan dalam menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan.

6. Dorongan

Sejalan dengan peran masyarakat dalam memberikan dukungan sumber daya dan dana, maka masyarakat dapat mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada pendidikan, seperti infrastruktur, kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru, dan pemerataan akses.

10.5. Peran Masyarakat Sebagai Komite Sekolah

Peran masyarakat yang berhubungan langsung dengan pendidikan, yakni orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah, masyarakat luas yang tergabung dalam dewan pendidikan, dunia usaha

seperti badan-badan usaha yang dapat berpartisipasi dalam program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), penyelenggara pendidikan non pemerintah, dan sebagainya. Adapun peran Komite Sekolah secara umum adalah:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadis dan Nurhayati. (2010). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Alfabeta: Bandung.
- Abdusyani. (2006). *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adi, I.R. 2007. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis, dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Adi, T. (2015). Pendidikan Masa Kolonial Belanda: Sebuah Tinjauan Historis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(1), 23-33.
- Adiatma, M. B., Hawari, M. R., & Syarif, F. F. (2023). Pengaruh Gaji Rendah Terhadap Kesejahteraan Guru SMA di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(3), 48-57.
- Adnin, N. (2023). *ANALISIS KUALIFIKASI AKADEMIK GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL* (Doctoral dissertation, HUKUM TATA NEGARA).
- Adriany, V. (2024, February 9). *Calon presiden harus tahu 5 permasalahan pendidikan di Indonesia*. <https://theconversation.com/calon-presiden-harus-tahu-5-permasalahan-pendidikan-di-indonesia-222885>

- Ainiyah, N. (2013). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Al-Ulum*, 13(1), 25-38.
- Akhwani, A., Nafiah, N., & Taufiq, M. (2021). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan dan pembiasaan di Sekolah Dasar. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 6(1), 1-10.
- Aminah, A., Hairida, H., & Hartoyo, A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8349-8358.
- Aminah, S. (2016). *Kuasa negara pada ranah politik lokal*. Prenada Media.
- Anam, C. C. K. (2024). *Analisis Angka Partisipasi Sekolah, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Purworejo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Anonim, 2017, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti. Jakarta.
- Anonim, 2017. Kumpulan Peraturan Perundang Undangan tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti, Jakarta.
- Anonim, 2017. Undang Undang Pemajuan Kebudayaan. Kemenristekdikti. Jakarta.
- Anonim, 2024. Kurikulum *Deep Learning*. Kemendikdasmen. Jakarta

- Antari, L. P. S., & De Liska, L. (2020). Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Widyadari*, 21(2), 676-687.
- Archer, M. (2013). *Social origins of educational systems*. Routledge.
- Arismunandar, M. P., Pramita, R. A., Putri, R. S. S., Ishar, A. A., Sirojuddin, M. P., Savitri, M., ... & Ahmad, D. W. (2021). *ISU TEORI DAN INOVASI PENDIDIKAN* (Vol. 270). CV Pena Persada.
- Arzaq, M. Y., Tadzkirotunnuha, Hidayat, M. A., Huda, K., Barokah, A. R., Khoeriyah, F., Ikhsan, K., Nahdliyin, C., Kholifah, N., & Bahri, M. S. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka di MI/SD. *Pekalongan: NEM*.
- Atikah, N., Sari, L., Aryani, T., Aisyah, S. N., & Trisno, B. (2024). KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 819-828.
- Aziz, F. Z., Setiawan, F., Hariadi, D., & Setianingsih, F. N. (2022). Transformasi kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia sebagai landasan pengelolaan pendidikan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(2), 217-228.
- Aziz, R. A., & Ulya, V. F. (2022). Internalisasi nilai karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di Madrasah. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 12(2), 171-187.
- Azmi, M. U. (2018). Impelementasi Pendidikan Karakter melalui Budaya Religius di Madrasah. *Al Mahsuni: Jurnal Studi Islam & Ilmu Pendidikan*, 1(1), 1-12.

- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). KAJIAN AKADEMIK MARET 2024 Kurikulum Merdeka. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Bandura, A. (1969). Social-learning theory of identificatory processes. *Handbook of socialization theory and research*, 213, 262.
- Baratz-Snowden, J., & Hill, H. C. (2015). *Teaching as a Profession: Teacher Education and Professional Development*. Harvard Education Press.
- Basuki, A. (2021). Pembangunan Pendidikan Di Provinsi Banten. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*.
- Behbahani, A. (2010). Technical and vocational education and the structure of education system in Iran. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 5, 1071-1075.
- Burch, P., & Miglani, N. (2018). Technocentrism and social fields in the Indian EdTech movement: Formation, reproduction and resistance. *Journal of Education Policy*, 33(5), 590-616. <https://doi.org/10.1080/02680939.2018.1435909>
- Cahaya, A. (2024). Peranan Pembelajaran Sejarah Sebagai Upaya Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kurikulum Merdeka. *Visi Sosial Humaniora*, 5(1), 194-205.

- Cahyani, N. D., Luthfiyah, R., Apriliyanti, V., & Munawir, M. (2024). Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Budaya Religius Untuk Meningkatkan Pembentukan Karakteristik Islami. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 23(1), 477-493. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Cohn, Elchanan. (1979). *The Economics of Education Revised Edition*. Massachusetts: A Subsidiary of Harper & Row Publisher, Inc
- Dafit, F., & Ramadan, Z. H. (2020). Pelaksanaan program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1429-1437.
- Danugroho, A. (2022). *Pendidikan dalam kaca mata ketahanan nasional* (Vol. 1). Jejak Pustaka.
- Darling-Hammond, L. (2010). *The Flat World and Education: How America's Commitment to Equity Will Determine Our Future*. Teachers College Press.
- Darmawan, C. (2020). Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 61-68.
- Depdiknas. (2009). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas

Deti Rostini, M. M., Mastiani, E., Yudianto, S. S., Haryani, S., & Nurlaela, N. (2024). *MANAJEMEN PENDIDIKAN: Untuk Pengembangan Karakter dan Prestasi Siswa*. Penerbit P4I.

Dinda Fitri Monita, 2019, Pembiayaan dalam Pendidikan. Artikel. Universitas Negeri Padang

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2013). *Kurikulum 2013: Panduan Implementasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Fadilah, M. Pd, Syakhirul Alim, W., Zumrudiana, A., Lestari, I. W., Baidawi, A., Elisanti, A. D., & S. KM. (2021). *Pendidikan karakter*. Agrapana Media.

Fattah, Nanang. (2009). Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9.

Fattah, Nanang. 2009. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosda Karya. Bandung

Fattah, Nanang. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Finaka, A. (2023). *Berapa Jumlah Sekolah di Indonesia 2023? | Indonesia Baik*. <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-jumlah-sekolah-di-indonesia-2023>

Ginting, S. (2022). *Buku Ajar: Pendidikan Kewarganegaraan*. Ideas Publishing.

Hadian, T., Mulyana, R., Mulyana, N., & Tejawiani, I. (2022). *Implementasi Project Based Learning*

Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 1 Kota Sukabumi. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11(6), 1659-1669.

Hadianti, A. N. (2024). IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN STEAM (SAINS, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ART AND MATHEMATIC) UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN SPIRITUAL DI RAUDHATUL ATHFAL HIDAYATUL MUBTADIIN JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN TAHUN AJARAN 2023/2024. *UNISAN JURNAL*, 3(1), 202-214.

Hakim, A. R., & Darojat, J. (2023). Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan Identitas Nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1337-1346.

Hamzah, M. R., Mujiwati, Y., Khamdi, I. M., Usman, M. I., & Abidin, M. Z. (2022). Proyek profil pelajar pancasila sebagai penguatan pendidikan karakter pada peserta didik. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(04), 553-559.

Hanna, A., Denton, E., Smart, A., & Smith-Loud, J. (2020). Towards a critical race methodology in algorithmic fairness. *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 501–512. <https://doi.org/10.1145/3351095.3372826>

Harisah, S. (2024). *TEKS CERITA INSPIRATIF: Teknik Penulisan dan Strategi Pengajaran Berkarakter*. Riau: CV Bravo Press Indonesia.

- Harris, A., & Bennett, N. (2001). *School Effectiveness and School Improvement: Alternative Perspectives*. Continuum International Publishing.
- Hartono. (2012). *Peran Penting Masyarakat Dalam Partisipasi Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Madrasah*. Al Hikmah, 2(2), 105–124.
- Haug, G., & Tauch, C. (1999). *Trends in learning structures in higher education*. Hochschuldirektorenkonferenz.
- Hayati, S., & Fadriati, F. (2023). Pendidikan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar pancasila pada mata pelajaran pendidikan agama islam di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3959-3969.
- Heningtyas, M. A., Sjamsuddin, S., & Hadi, M. (2014). *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi “Kampung Inggris” Kabupaten Kediri)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 264–268.
- Herlambang, Y. T. (2021). *Pedagogik: Telaah kritis ilmu pendidikan dalam multiperspektif*. Bumi Aksara.
- Hermawan, D., Habibi, F., Hazbullah, M. N., & Hidayatullah, M. S. (2021). *KADO GURU: Dinamika Pendidikan dalam Konteks*. Penerbit NEM.
- Heru Juabdin Sada. (2017). *Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam*. Al-Tadzkiyyah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No 1, hal. 117-125.

- Holmes, W., & Porayska-Pomsta, K. (Eds.). (2023). *The ethics of artificial intelligence in education: Practices, challenges, and debates*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Huang, L. (2023). Ethics of Artificial Intelligence in Education: Student Privacy and Data Protection. *Science Insights Education Frontiers*, 16(2), 2577–2587. <https://doi.org/10.15354/sief.23.re202>
- Huang, R., Spector, J. M., & Yang, J. (2019). *Educational Technology: A Primer for the 21st Century*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6643-7>
- Hulawa, D. E. (2022). Pedagogi pembentukan karakter ulul albab pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6057-6068.
- I Nyoman Temon Astawa. (2017). *Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia*. Jurnal Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Vol. 3 Nomor 2, hal. 197-205.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jakarta: Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. (2010). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Irawan, M. F., Bella, S., & Latifah, A. (2024). Teachers and Parents Perceptions of the 9-Year Compulsory Education Policy in Indonesia. *Journal of Insan Mulia Education*, 2(2), 81-87.
- Iskandar, A., Parnawi, A., Sagena, U., Kurdi, M. S., Fitra, D., Nursifah, N., ... & Rahmi, H. (2023). Transformasi digital dalam pembelajaran.
- Iskandar, A., Winata, W., Kurdi, M.S., Sitompul, P.H.S., Kurdi, M.S., Nurhayati, S., Hasanah, M. and Haluti, F., (2023). *Peran Teknologi Dalam Dunia Pendidikan*. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Isma, C. N., Rahmi, R., & Jamin, H. (2022). Urgensi digitalisasi pendidikan sekolah. *AT-TA'DIB: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 129-141.
- Ismail, S., Suhana, S., & Zakiah, Q. Y. (2020). Analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar pancasila di sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 76-84.
- Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). *Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan: Arah Pendidikan di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iswanto, K. D. D., Aliy, A. L., & Al-Amin, M. N. F. (2024). ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN PROBLEM TREE ANALYSIS. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5).

- Iswatiningsih, D. (2019). Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal di sekolah. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 155-164.
- Jatiyasa, I. W., Dahlan, T., Iskandar, A., Mertayasa, I. K., Kurdi, M. S., & Kurdi, M. S. (2024). *Guru Membangun Kelas Aktif dan Inspiratif*. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- John, R.L., E-L. Morphet, & K. Alexander. 1983. *The Economic and Financing of Education*. London: Prentice Hall Inc.
- Kahar, M. I., Cika, H., Afni, N., & Wahyuningsih, N. E. (2021). Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0 Di Masa Pandemi Covid 19. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(1), 58-78.
- Karim, A., & Bahari, Y. (2024). Model pendidikan berbasis komunitas. *Tumoutou Social Science Journal*, 1(2), 92-99.
- Kaufmann, R., & Vallade, J. I. (2022). Exploring connections in the online learning environment: Student perceptions of rapport, climate, and loneliness. *Interactive Learning Environments*, 30(10), 1794-1808. <https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1749670>
- Kemdikbud. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Pintu Masuk Pembentukan Pendidikan Nasional 17 Juli 2017 diakses pada <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/0>

7/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-
masuk-pembenahan-pendidikan-nasional

Kemendikbudristek. (2022). Kemendikbudristek
Pastikan IKM Membentuk Siswa Unggul yang
Cerdas dan Berkarakter 30 Agustus 2022 diakses
pada

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/08/kemendikbudristek-pastikan-ikm-membentuk-siswa-unggul-yang-cerdas-dan-berkarakter>

Kemendiknas.2010. Pengembangan Pendidikan Budaya
dan Karakter Bangsa.Jakarta: Kementrian
Pendidikan Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023).
*Buku Data Statistik Aplikasi Informatika Tahun
2023*. Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia. (2017). Standar Nasional Pendidikan.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018).
*Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter pada
Lembaga Kursus dan Pelatihan*. Jakarta: Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia. *Profil Pelajar
Pancasila*. Diakses pada 1 Oktober 2024 dari
<https://www.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia. (n.d.). Sahabat

Karakter: Panduan Kegiatan Profil Pelajar Pancasila. Diakses pada 1 Oktober 2024, dari <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/sahabatkarakter/kegiatan/a9151c70-96fe-4594-aa38-e40e5d7ad237.pdf>

Koentjoroningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kohlberg, L., & Hersh, R. H. (1977). Moral development: A review of the theory. *Theory into practice*, 16(2), 53-59.

Komara, E. (2018). Penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran abad 21. *Sipatahoenan*, 4(1).

Kurdi, M. S. (2021). Realitas virtual dan penelitian pendidikan dasar: tren saat ini dan arah masa depan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 1(4), 60-85.

Kurdi, M. S., Mardiah, M., Kurdi, M. S., Usman, M. I. G., & Taslimurrahman, T. T. (2020). Speaking Activities In Madrasah Ibtidaiyah: A Meta Narrative About Character Building And Multiculturalism Point Of View. *Al-Bidayah: jurnal pendidikan dasar Islam*, 12(1), 55-82.

Kurniawan, M. A. (2022). *EVALUASI ALIH KELOLA KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG: Studi Aspek Pemberdayaan Guru di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal, SMAN 1 Bangkumat Belimbing tahun*

2017-2021 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

Lickona, T. (1992). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam.

Luckin, R., Holmes, W., & Forcier, L. B. (2016). *An argument for AI in Education*. London: Pearson.

Lutfiyah, M. (2013). *Peran Masyarakat Dalam Memajukan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02 Desa Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang*. Universitas Negeri Semarang.

Madrim, S. (2022, November 11). *Mendikbud: 10,2 Juta Pengguna Pakai Platform Pendidikan*. VOA Indonesia.
<https://www.voaindonesia.com/a/mendikbud-10-2-juta-pengguna-pakai-platform-pendidikan/6828882.html>

Maisaroh, A. A., & Untari, S. (2024). *Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045*. *Jurnal kebijakan pemerintahan*, 18-30.

Maisyaroh. (2011). *Maksimalisasi Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Tesis Manajemen Pendidikan Islam UIN Maliki Malang.

Ma'rufah, A. (2022). *Implementasi pendidikan karakter dalam digitalisasi pendidikan*. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1), 17-29.

- Maunah, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(1).
- Meyer, J. W., Rowan, B., & Meyer, M. W. (1978). The structure of educational organizations. *Schools and society: A sociological approach to education*, 217-225.
- Mizani, H., Cahyadi, A., Hendryadi, H., Salamah, S., & Retno Sari, S. (2022). Loneliness, student engagement, and academic achievement during emergency remote teaching during COVID-19: The role of the God locus of control. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 305. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01328-9>
- Mu'in, F. (2019). *Pendidikan Karakter: Perspektif Teoretis dan Gagasan Praktis*. Banjarbaru: Scripta Cendikia.
- Mukhtar, M. A. (2019). *Kiprah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam peningkatan mutu guru di Indonesia* (Master's thesis, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). repository.uinjkt.ac.id
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Revolusi mental dalam pendidikan untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan*.

Dalam *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.

Mulyono, Abdulrahman., (2010), Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyono. (2008). *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta.

Munandar, A., Alfian, M. R., Echa, A. J., Zora, K. A., Aprianti, A., Mulyani, G., Mujahidin, M., Rahmawati, E., Febiola, F., & Pitriani, P. (2023). Evaluasi program pendidikan karakter. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 682–688.

Mustakim, M., Sutarto, S., & Fadila, F. (2024). *Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MIS Guppi 11 Talang Rimbo* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Mustoip, S. (2023). Analisis penilaian perkembangan dan pendidikan karakter di kurikulum merdeka sekolah dasar. *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, 1(3), 144-151.

Mustoip, Sofyan, Muqarramah Sulaiman Kurdi, Syafruddin Fanny Rahmatina Rahim, Musyarrafah Sulaiman Kurdi, Mohamad Arif Rahmansyah, Nofvia De Vega, Qiyadah Robbaniyah, Yeni Yusella, and Angelina Kurnia Juita. (2024). "STRATEGI PEMBELAJARAN." Kuningan: Aina Media Baswara.

Musyawir, A. W., Dzulhakim, D., Andini, F., Ashari, N. F., Hairunnisa, H., Zikrullah, Z., & Herianto, E. (2024). Peran Kurikulum Berbasis Karakter Dalam

Mendorong Perkembangan Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 542-551.

Nasution, N. A. I. A., & Masyithoh, S. (2024). INTEGRASI AKHLAK DALAM DIMENSI SPIRITUAL, TEOLOGIS, SYARIAT, PENDIDIKAN, DAN FILOSOFIS. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 120-133.

Nurdin, M. (2015). Pendidikan di Era Reformasi: Tantangan dan Peluang. Yogyakarta: Laksana.

Nurhasanah. (2017). *Peran Masyarakat Dalam Lembaga Pendidikan*. Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar. Vol. 1, no. 1, hal. 61-67.

Nurlina. (2018). *Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Madrasah*. Jurnal Adaara, Vol. 6, no.1, hal. 498-517.

Nuryani, P., Ibrahim, T., & Juwita, W. M. (2021). Workshop Pendidikan Karakter Guru Pembelajar Dengan Pendekatan Pedagogik Kritis. *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(1), 969-980.

OECD. (2020). *Back to the Future of Education FOUR OECD SCENARIOS FOR SCHOOLING*. OECD.

Paddu, A. H. (2024). Peta Arah Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Outlook Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Indonesia. *Ekonomi Indonesia Kini dan Esok*, 23.

- Pala, A. (2011). The need for character education. *International journal of social sciences and humanity studies*, 3(2), 23-32.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Perdana, N. S. (2018). Implementasi peranan ekosistem pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2).
- Popham, W. J. (2013). *Assessment for Educational Leaders*. Pearson.
- Pracelia, V. R., Widodo, D., & Radjikan, R. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA-JAWA TIMUR. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(3), 21-30.
- Prastowo, A. (2018). *Sumber belajar dan pusat sumber belajar: Teori dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Kencana.
- Pratama, Y. A., & Dewi, L. (2023). *Pengembangan Kokurikuler: Menumbuhkan Potensi, Meraih Merdeka Belajar*. Indonesia Emas Group.

- Prayudi, S., & Taqiyuddin, M. (2024). EVALUASI KURIKULUM MERDEKA PADA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDN 008 LABUHAN PAPAN. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 6(4), 51-60.
- Purnawanto, A. T. (2023). Pendidikan Karakter Melalui Internalisasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka. *JURNAL PEDAGOGY*, 16(2), 103-115.
- Purwadinata, S., & Ridolof, W. B. (2024). Perekonomian Indonesia: Persoalan Kebijakan, Isu Kontemporer dan Globalisasi Pembangunan.
- Pusat Penguatan Karakter, Sekretariat Jenderal. (2017). *Modul pelatihan pendidikan karakter bagi guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Puspitawati, S. (2017). *Pendidikan dalam Era Digital: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putra, E. R. (2018). *Pendidikan di Indonesia Holisme, Pragmatisme & Disrupsi*. Rasibook.
- Putri, N. S. E., Setiani, F., & Al Fath, M. S. (2023). Membangun Pendidikan Karakter Berbasis Kurikulum Merdeka Menuju Era Society 5.0: Building Character Education Based On The Merdeka Curriculum Towards Society Era 5.0. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 18(2), 194-201.
- Putri, N. Y. E., Anjali, I. G. A. S., & Anggraini, A. E. (2024). Konsep Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Menurut Perspektif Ki Hadjar Dewantara. *JIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 460-467.

- Qorib, M. (2020). [BUKU] INTEGRASI ETIKA DAN MORAL Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Rachmadtullah, R., & Ahmad, M. (2018). Inovasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahim, A., & Ismaya, B. (2023). Pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka belajar: tantangan dan peluang. *JSE Journal Sains and Education*, 1(3), 88-96.
- Rahimah, R. (2022). Peningkatan kemampuan guru SMP negeri 10 kota tebingtinggi dalam menyusun modul ajar kurikulum merdeka melalui kegiatan pendampingan tahun ajaran 2021/2022. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 92-106.
- Reschovsky, Andrew dan Jennifer Imazeki. (2003). *Let No Child be Left Behind: Determining the Cost of Improving Student Performance*. Public Finance Review, Vol. 31 No. 3, May 2003 hal 263- 290.
- Retnaningsih, L. E., & Khairiyah, U. (2022). Kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini. *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 8(2), 143-158.
- Reysen, R., Perryman, M., & Phipps, R. (2017). Theories of moral development. College student development: Applying theory to practice on the diverse campus.

- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. London: Palgrave Macmillan.
- Rifai, M. (2022). Pembelajaran STEAM Sebagai Pembelajaran Inovatif. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(8), 3469-3474.
- Rigianti, H. A., & Situmorang, F. (2024). Pengaruh Program Literasi Bahasa Inggris Terhadap Keterampilan Berbahasa Inggris Pada Siswa Sekolah Dasar. *Sistem-Among: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 4(1), 27-34.
- Rizandhi, A., Nurwahidah, N., & Darmiany, D. (2024). Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas di SDN Telaga Baru Kecamatan Taliwang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(1), 131-141.
- Rizati, M. (2023). *Kemendikbud: Ada 53,14 Juta Murid di Indonesia pada 2023/2024*. <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/kemendikbud-ada-5314-juta-murid-di-indonesia-pada-20232024>
- Rohimah, D. (2022). Perancangan Ma'had Tahfidz Qu'ran dengan Pendekatan Permaculture di Pantai Balikpapan.
- Rohmah, N. N. S., Narimo, S., & Widyasari, C. (2023). Strategi penguatan profil pelajar Pancasila dimensi berkebhinekaan global di sekolah dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(3), 1254-1269.
- Rohmah, R. M. R., & Azizah, R. (2023). Peran Pendidikan Holistik Bagi Pengembangan Karakter Anak Usia

Dini. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 11(1), 154-165.

Rohmat (2016). Penguatan nilai-nilai Kewirausahaan dan pendidikan karakter bagi mahasiswa PAI IAIN Surakarta. *Shahih Journal of Islamicate Multidisiplinary*.

Rudiawan, R., & Cahyono, H. (2022). Praktik profil pelajar pancasila di SMA Negeri Tulakan Pacitan. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 7(2), 23-35.

Rusli, T. S., Kemala, R., & Nazmi, R. (2024). *PENDIDIKAN KARAKTER GEN-Z: Tips dan Trik Mendidik Karakter Gen-Z bagi Pendidik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Safaat, S. (2019). Pembentukan karakter secara holistik. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*, 3(1), 27-34.

Safitri, A., Wulandari, D., & Herlambang, Y. T. (2022). Proyek penguatan profil pelajar pancasila: Sebuah orientasi baru pendidikan dalam meningkatkan karakter siswa indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7076-7086.

Safitri, S. A., & Fajar, F. (2023). Hambatan-Hambatan Dalam Proses Adaptasi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka (Studi Pada Guru Sma Negeri 1 Semarang).

Sairiltiata, S., Umarella, M., Johansz, D., & Septory, J. (2023). Sosialisasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Guru-Guru di SD Inpres Tomra di Wilayah Daerah 3T (Terdepan, Terpencil Dan

Tertinggal). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi*, 2(4), 43-51.

Sakinah, E. R. (2023). *Analisis Penggunaan Dana Bos Pada Persepsi Kepentingan Internal Dan Eksternal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

Sallis, E. (2002). *Total Quality Management in Education*. Routledge.

Samrin, S. (2021). Strategi guru pendidikan agama islam dalam mengembangkan pendidikan karakter pada peserta didik. *Shautut Tarbiyah*, 27(1), 77-98.

Santika, I. G. N., Suarni, N. K., & Lasmawan, I. W. (2022). Analisis perubahan kurikulum ditinjau dari kurikulum sebagai suatu ide. *Jurnal Education and development*, 10(3), 694-700.

Saputra, A. M. A., Tawil, M. R., Hartutik, H., Nazmi, R., La Abute, E., Husnita, L., ... & Haluti, F. (2023). Pendidikan Karakter Di Era Milenial: Membangun Generasai Unggul Dengan Nilai-Nilai Positif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Saputri, A. I. (2024). Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Profil Pelajar Pancasila: Sebuah Arah Baru Pendidikan Dalam Meningkatkan Karakter Siswa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 5(1), 25-35.

Saragih, O., & Marpaung, R. (2024). Tantangan dan Peluang: Studi Kasus Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Mandiri Berubah Kabupaten

Tapanuli Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(3), 888-903.

Sardiman. (2013). *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sari, S. P., & Bermuli, J. E. (2021). Pembentukan karakter tanggung jawab siswa pada pembelajaran daring melalui implementasi pendidikan karakter. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(1), 110–121.

Sarnoto, A. Z. (2024). Model pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. *Journal on Education*, 6(3), 15928-15939.

Setyowati, E., & Permata, A. (2018). Service learning: Mengintegrasikan tujuan akademik dan pendidikan karakter peserta didik melalui pengabdian kepada masyarakat. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 143.

Shah, P. (2023). *AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence*. John Wiley & Sons.

Sholekah, F. F. (2020). Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. *Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 1-6.

Siagian, N., & Alia, N. (2020). Strategi penguatan karakter nasionalis di kalangan siswa. *KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional*, 2(1), 190-197.

- Sihotang, K. (2019). *Berpikir kritis: Kecakapan hidup di era digital*. PT Kanisius.
- Soedijarto. (2008). *Pendidikan Nasional: Strategi dan Implementasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Solihin, M. (2013). *Pendidikan di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Kencana.
- Solissa, E. M., Hayati, A. A., Rukhmana, T., Muharam, S., Mardikawati, B., & Irmawati, I. (2024). Mengembangkan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Menuju Society 5.0. *Journal on Education*, 6(2), 11327-11333.
- Sri Adiningsih, S. E. (2019). *Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia: lahirnya tren baru teknologi, bisnis, ekonomi, dan kebijakan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sri Minarti. (2011). *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri*. Ar- Ruzz Media: Jogjakarta.
- Sudrajat, T., & Hasanah, A. (2020). Nilai-Nilai Pancasila Dan Peradaban Bangsa: Konsepsi Dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 857-867.
- Suharsaputra, Uhar. (2013) *Administrasi Pendidikan*. PT Refika Aditama, Bandung

- Sujatmoko, E. (2010). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal konstitusi*, 7(1), 181-212.
- Sukoco, G. A., & Arsendy, S. (2023, August 25). *Pascapandemi: Sudah pulihkah pendidikan kita dari 'learning loss'? The Conversation*. <http://theconversation.com/pascapandemi-sudah-pulihkah-pendidikan-kita-dari-learning-loss-211677>
- Sulhan, M. (2018). Pendidikan Karakter Berbasis Budaya dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Visipena*, 9(1), 159-172.
- Supriyadi, Ahmand. (2003). System pembiayaan berdasarkan syariah, 10, 42-58
- Supriyadi, D. (2019). Kurikulum Pendidikan Nasional: Sejarah dan Perkembangannya. Malang: UIN Malang Press.
- Suwahyu, I. (2018). Pendidikan karakter dalam konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(2), 192-204.
- Suyitno, I. (2012). Pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa berwawasan kearifan lokal. *Jurnal pendidikan karakter*, 3(1).
- Syafrudin, A. (2020). Kurikulum Merdeka: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tech in Asia. (2023, July 17). *Data Pelaku Layanan Edtech di Indonesia*.

<https://id.techinasia.com/data-pelaku-edtech-indonesia>

- Teichler, U. (2006). Changing structures of the higher education systems: The increasing complexity of underlying forces. *Higher Education Policy*, 19, 447-461.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Trisnanto, A. (2018). *Sanitasi di Indonesia Timur: keberlanjutan dan inovasi kebijakan*. Universitas Brawijaya Press.
- Tyler, R. W. (2013). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. University of Chicago Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara.
- UNESCO. (2014). *Global Education Monitoring Report 2014: Teaching and Learning: Achieving Quality for All*. Paris: UNESCO.
- Usman, J. (2017). Urgensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Meningkatkan Mutu dalam Pendidikan Madrasah. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v11i2.1170>.

- Utama, A. N., & Febrianty, Y. (2024). ANALISIS UPAYA MEMBANGUN KARANTINA MORALITAS SEBAGAI PONDASI SUPREMASI HUKUM DI KALANGAN GENERASI MUDA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1-10.
- Van de Werfhorst, H. G., & Mijs, J. J. (2010). Achievement inequality and the institutional structure of educational systems: A comparative perspective. *Annual review of sociology*, 36(1), 407-428.
- Veirissa, A. H. (2021). kualitas guru di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* (Vol. 4, No. 1, pp. 267-272).
- Wahab, M., Congge, U., & Juharni, J. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sinjai (Studi pada SMP Negeri 3 Sinjai). *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 1(1), 38-42.
- Winarno, W. (2016). Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013. Bandung: Alfabeta.
- Windianto, C. P. (2022). *Revealing and Criticizing an Indonesian Edu-Tech Company's Capitalism Ideology which Dehumanizes Indonesian Teachers: A Critical Discourse Analysis*. 13.
- Wulandari, R. S., & Hendriani, W. (2021). Kompetensi pedagogik guru sekolah inklusi di Indonesia (Suatu pendekatan systematic review). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian*

Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran, 7(1), 143-157.

Youtube,2024, Nomenklatur Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan RDP DPR RI. Meliputi Kementerian Dikdasmen,Kementerian Pendidikan Tinggi,Sains dan Teknologi, juga Kementerian Kebudayaan.

Yu, S., & Lu, Y. (2021). *An Introduction to Artificial Intelligence in Education*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-16-2770-5>

Yusuf, I. A. (2024). Ragam Model Penanaman Karakter di Satuan Lembaga Pendidikan (Pesantren, Madrasah dan Sekolah). *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2(3)*, 85-104.

Yusuf, M. (2014). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuwono, W. (2020). Konseptualisasi peran strategis dalam pendidikan literasi keuangan anak melalui pendekatan systematic review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2)*, 1419-1429.



Sistem pendidikan di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak era kerajaan Nusantara, di mana pendidikan berpusat pada istana dan lembaga keagamaan. Selama masa penjajahan, sistem pendidikan mulai terstruktur, meskipun bersifat diskriminatif dan hanya terbuka bagi kalangan tertentu. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia membangun sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Meskipun telah banyak kemajuan, tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia masih signifikan. Disparitas kualitas pendidikan antardaerah, kekurangan tenaga pendidik yang kompeten, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil menjadi isu yang terus diupayakan solusinya. Oleh karena itu, pengembangan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berorientasi masa depan harus menjadi prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di tingkat global.



Penerbit Cendikia
Mulia Mandiri



ISBN 978-623-8744-88-6



9

786238

744886